



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor:SK.KBSN-154/OT.01/VI/BSN-2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilaksanakan reviu atas IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 -2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Pencarian dan Pertolongan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelemetasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan SAR Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
11. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1282);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 hasil reviu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini, disusun secara berjenjang (*cascade*) dan selaras (*alignment*).

KETIGA : Manual indikator sebagai pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEEMPAT : IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KELIMA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan.

KEENAM : . . .

- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-154/OT.01/VI/BSN-2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHUH : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
 PERTOLONGAN
 NOMOR: SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 TAHUN 2020-2024.

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SS.1	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	<p>Mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. % pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan (A) $\frac{\text{Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah tenaga pencarian dan pertolongan}} \times 100\%$ 2. % pemenuhan sarana dan prasarana (B) = $\frac{\text{Jumlah KPP,Pos PP yang sudah memiliki sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah KPP,Pos PP yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$ 3. % pemenuhan sistem komunikasi (C) $\frac{\text{Jumlah sistem komunikasi yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah sistem komunikasi}} \times 100\%$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
			4. Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan = $\% = \frac{(\%A + \%B + \%C)}{3} \times 100\%$
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan 1. % kesiapan sarana dan prasarana (A) $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang serviceable}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki}} \times 100\%$ 2. % kesiapan perangkat & peralatan sistem komunikasi (B) $\frac{\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang serviceable}}{\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang dimiliki}} \times 100\%$ 3. Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan = $\% = \frac{(\% A + \% B)}{2} \times 100\%$
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan selain ABK, Rescuer dan Potensi yang telah memiliki sertifikat 1. Persentase tenaga ABK yang bersertifikat: $\frac{\text{Jumlah tenaga ABK yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah tenaga ABK yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$ 2. Persentase tenaga Rescuer yang bersertifikat: $\frac{\text{Jumlah tenaga Rescuer yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah tenaga Rescuer yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
				3. Persentase Potensi pencarian dan pertolongan yang bersertifikat: $\frac{\text{Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$
SS.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	Indikator ini menghitung rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap: a. unit layanan pencarian dan pertolongan b. unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan c. unit layanan pembinaan potensi
SS.3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Indikator ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{Response time} = \frac{\sum T1-T0}{\text{Jumlah Respon}}$ </div> Keterangan: T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita
		IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi : $\frac{\text{Jumlah korban selamat + meninggal}}{\text{Total korban}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BINA TENAGA DAN BINA POTENSI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SP.1 Meningkatkan kompetensi SDM tenaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.1.1 Persentase peningkatan jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan anak buah kapal (ABK) yang kompeten	%	Mengukur peningkatan kompetensi petugas pencarian dan pertolongan dan anak buah kapal (ABK) $\% = \frac{(\text{Jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan ABK yang kompeten})}{\text{jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan ABK}} \times 100\%$
SP.2 Meningkatkan kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan	IKSP.2.1 Persentase keterlibatan SDM potensi pencarian dan pertolongan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase keterlibatan SDM potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{jumlah SDM potensi yang terlibat penyelenggaraan operasi SAR}}{\text{jumlah SDM Potensi yang ada}} \times 100\%$
	IKSP.2.2 Persentase pemahaman SDM potensi tentang pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase potensi yang tersertifikasi pelatihan teknis pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah SDM potensi SAR yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah target SDM potensi SAR yang akan dibina}} \times 100\%$
	IKSP.2.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelatihan potensi pencarian dan pertolongan	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan Kriteria penilaian: A: Sangat Baik = 81.26 - 100.00 B: Baik = 62.51 - 81.25 C: Kurang Baik = 43.76 - 62.50 D: Tidak Baik = 25 - 43.75

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT BINA TENAGA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 1.1.1	Terwujudnya peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional	IKSK. 1.1.1.a	Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina.	%	Mengukur persentase jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina, meliputi pemangku jabatan fungsional teknis pencarian dan pertolongan, awak sarana laut, awak sarana udara, dan paramedis $\% = \frac{\text{Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina}}{\text{jumlah tenaga pencarian dan pertolongan keseluruhan}} \times 100\%$
		IKSK. 1.1.1.b	Persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi	%	Mengukur persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi melalui uji kompetensi profesi $\% = \frac{\text{Jumlah petugas pencarian dan pertolongan yang lulus uji kompetensi profesi}}{\text{jumlah petugas pencarian dan pertolongan yang mengikuti uji kompetensi profesi}} \times 100\%$
		IKSK. 1.1.1.c	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Teknis Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur indeks kepuasan pranata pencarian dan pertolongan terhadap layanan pengelolaan jabatan fungsional teknis pencarian dan pertolongan. Kriteria penilaian: A: Sangat Baik = 81.26 - 100.00 B: Baik = 62.51 - 81.25 C: Kurang Baik = 43.76 - 62.50 D: Tidak Baik = 25 - 43.75
SK. 1.2.1	Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 1.2.1.a	Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria, rencana dan pengembangan tenaga yang terimplementasi	%	Mengukur persentase NSPK rencana dan pengembangan tenaga dan diimplementasikan. $\% = \frac{\text{Jmlh NSPK, rencana dan pengembangan tenaga yg diimplementasikan}}{\text{Jmlh NSPK rencana dan pengembangan tenaga yang ada}} \times 100\%$

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT BINA POTENSI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 2.1.1	Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang potensi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai kebutuhan	IKSK. 2.1.1.a	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang potensi pencarian dan pertolongan yang diimplementasikan	%	Mengukur Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang potensi pencarian dan pertolongan yang diimplementasikan $\% = \frac{\text{jumlah NSPK di bidang potensi yang diimplementasikan}}{\text{jumlah NSPK di bidang potensi yang ada}} \times 100\%$
SK. 2.2.1	Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 2.2.1.a	Persentase keterlibatan potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur keterlibatan SDM potensi pencarian dan pertolongan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{jumlah SDM Potensi SAR yang terlibat}}{\text{jumlah SDM Potensi SAR yang ada}} \times 100\%$
SK. 2.2.2	Meningkatnya efektivitas pendataan potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 2.2.2.a	Persentase data potensi Pencarian dan Pertolongan yang mutakhir secara berkala	%	Mengukur pemutakhiran data potensi pencarian dan pertolongan secara berkala $\% = \frac{\text{jumlah data potensi SAR yang baru}}{\text{jumlah target potensi yang terbina}} \times 100\%$
SK. 2.3.1	Meningkatnya SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan yang paham tentang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	IKSK. 2.3.1.a	Persentase SDM Potensi yang memahami penyelenggaraan pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur SDM Potensi yang paham tentang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{jumlah SDM Potensi SAR yang paham}}{\text{jumlah SDM Potensi SAR yang ada}} \times 100\%$

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM KOMUNIKASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SP.3	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSP.3.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terhadap Standar Kebutuhan sarana dan Prasarana SAR Rata-rata presentase pemenuhan Sarana dan Prasarana SAR dengan Standar Kebutuhan
		IKSP.3.2	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	Indeks	Mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan, Pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengujian sarana terhadap jumlah dukungan yang diminta, jumlah perencanaan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengujian sarana. Formulasi Indeks Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana terdiri dari: 1. Bobot 50% : Pemenuhan Dukungan Sarana Prasarana 2. mengukur jumlah dukungan sarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta 3. Bobot 25% : Pembinaan Teknis (mengukur jumlah pelaksanaan pembinaan teknis terhadap perencanaan pelaksanaan pembinaan teknis) 4. Bobot 25% : Persentase Pengujian Sarana (mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana terhadap perencanaan pelaksanaan pengujian sarana)
		IKSP.3.3	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kesiapan Sarana dan Prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas SAR Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SP.4	Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.4.1	Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi terhadap Standar Kebutuhan Sistem Komunikasi Rata-rata presentase pemenuhan sistem komunikasi dengan Standar Kebutuhan
		IKSP.4.2	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	Indeks	Mengukur indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
		IKSP.4.3	Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kesiapan Sistem Komunikasi dalam menunjang keberhasilan tugas SAR Rata-rata tingkat kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
		IKSP.4.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 3.1.1	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas	IKSK. 3.1.1.a	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan darat terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR % = $\frac{\text{Jumlah sarana SAR darat yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal sarana}} \times 100 \%$
		IKSK. 3.1.1.b	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan laut	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan laut terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR % = $\frac{\text{Jumlah sarana SAR laut yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal sarana}} \times 100 \%$
		IKSK. 3.1.1.c	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan udara	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan udara terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR % = $\frac{\text{Jumlah sarana SAR udara yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal sarana}} \times 100 \%$
		IKSK. 3.1.1.d	Persentase Pemenuhan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan peralatan SAR % = $\frac{\text{Jumlah peralatan SAR yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal peralatan}} \times 100 \%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 3.1.1.e	Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan prasarana SAR % = $\frac{\text{Jumlah prasarana SAR yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal prasarana}} \times 100\%$
		IKSK. 3.1.1.f	Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana	Dok	Mengukur Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana Jumlah dokumen evaluasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana
		IKSK. 3.1.1.g	Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan	Dok	Mengukur standar/prosedur/petunjuk teknis sarana dan prasarana yang telah disahkan % = $\frac{\text{Standar sarana dan prasarana yang disahkan}}{\text{standar sarana dan prasarana yang direncanakan}} \times 100\%$
SK. 3.2.1	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana	IKSK. 3.2.1.a	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana	%	Mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta. % = $\frac{\text{Jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan}}{\text{jumlah dukungan yang diminta}} \times 100\%$
		IKSK. 3.2.1.b	Persentase penerapan materi pembinaan teknis	%	Mengukur tingkat penerapan materi pembinaan teknis pada pengelolaan sarana dan prasarana di unit kerja % = $\frac{\text{Jumlah peserta pembinaan teknis}}{\text{jumlah peserta yang menerapkan materi pembinaan teknis di Unit Kerja}} \times 100\%$
		IKSK. 3.2.1.c	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Sarana	%	mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 3.2.1.d	Persentase pemenuhan dukungan perbekalan	Indeks	Mengukur jumlah dukungan perbekalan yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta % = $\frac{\text{Jumlah dukungan perbekalan yang diberikan}}{\text{jumlah dukungan yang diminta}} \times 100\%$
SK. 3.3.1	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	IKSK. 3.3.1.a	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat dalam setahun Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana darat/365 hari x 100 %
		IKSK. 3.3.1.b	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut dalam setahun % = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana laut/365 hari) x 100 %
		IKSK. 3.3.1.c	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara dalam setahun % = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana udara/365 hari) x 100 %
		IKSK. 3.3.1.d	Persentase Kesiapan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan dalam setahun % = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i> peralatan/365 hari) x 100 %
		IKSK. 3.3.1.e	Persentase Kesiapan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan dalam setahun % = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i> prasarana/365 hari) x 100 %
		IKSK. 3.3.1.f	Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana	%	Mengukur kesesuaian data inventarisasi dengan fisik Jumlah laporan updating data sarana dan prasarana

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 4.1.1	Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi	IKSK. 4.1.1.a	Persentase norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis yang disahkan	%	Indikator ini mengukur jumlah norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis yang disahkan dibanding dengan yang direncanakan %= Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang telah disahkan/Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang direncanakan) x 100 %
		IKSK. 4.1.1.b	Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang peralatan komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi terhadap Standar Kebutuhan Peralatan Komunikasi % = (Jumlah peralatan komunikasi yg sudah dipenuhi /Jumlah standar kebutuhan minimal) *100%
		IKSK. 4.1.1.c	Persentase Dokumen Evaluasi di Bidang Sistem Komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur pemenuhan terhadap dokumen evaluasi di bidang Sistem Komunikasi % = $\frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi yang dipenuhi}}{\text{Jumlah dokumen evaluasi yang direncanakan}} \times 100 \%$
		IKSK. 4.1.1.d	Persentase tata usaha dan kearsipan dalam mendukung kegiatan Direktorat Sistem Komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur dokumen SAKIP dan Arsiparis. % = $\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipenuhi}}{\text{Jumlah dokumen yang direncanakan}} \times 100 \%$
SK. 4.2.1	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan dukungan	IKSK. 4.2.1.a	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan	Indeks	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah kegiatan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
	komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya.		pertolongan		$\% = (\text{Jumlah dukungan sistem komunikasi yang di laksanakan} / \text{jumlah dukungan sistem komunikasi yang direncanakan}) \times 100\%$
		IKSK. 4.2.1.b	Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC	%	Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat false alert yang terdeteksi di Indonesia, Semakin kecil tingkat false alert maka semakin baik penilaiannya. <i>(false alerts world-wide with Participant's country code(s) + undetermined alerts world-wide with Participant's country code(s)) / estimated total number of beacons with Participant's country code(s)</i>
		IKSK. 4.2.1.c	Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya	data	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah data registrasi radio beacon yang terdaftar di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
SK. 4.3.1	Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi	IKSK. 4.3.1.a	Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi yang siap digunakan dalam setahun $\% = \text{Jumlah Hari Serviceable} / 365 \text{ hari} \times 100 \%$
		IKSK. 4.3.1.b	Persentase keakuratan data peralatan komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur keakuratan data inventarisasi dan data peralatan komunikasi yang telah terverifikasi Dilakukan pembobotan untuk mengetahui keakuratan data inventarisasi dan data pemeliharaan Adapun bobot yang digunakan adalah: Bobot Pencapaian Inventarisasi Peralatan

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan										
					<p>Komunikasi : 60%</p> <p>Bobot Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi : 20%</p> <p>Bobot Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater: 20%</p> <p>rumus = (Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi x 60%) + (Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi x 20%) + (Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater x 20%)</p>										
SK. 4.4.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	IKSK. 4.4.1.a	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (<i>Beacon</i>)	Nilai	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)</p> <p>IKM= (Total dari Nilai Persepsi per unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang</p> <p>adapun range indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>Klasifikasi</td> <td>Range</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>81.26 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>62.51 - 81.25</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>43,76 - 62.50</td> </tr> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>25 - 43.75</td> </tr> </table>	Klasifikasi	Range	Sangat Baik	81.26 - 100	Baik	62.51 - 81.25	Kurang Baik	43,76 - 62.50	Tidak Baik	25 - 43.75
Klasifikasi	Range														
Sangat Baik	81.26 - 100														
Baik	62.51 - 81.25														
Kurang Baik	43,76 - 62.50														
Tidak Baik	25 - 43.75														

8. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SP.5	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	IKSP.5.1	Indeks siaga pencarian dan pertolongan	Nilai 1-100	<p>Pengukuran dari pelaksanaan:</p> <p>A. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan mempertimbangkan perbandingan dari 4 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, fasilitas pendukung;</p> <p>B. Siaga khusus pencarian dan pertolongan, yaitu perbandingan siaga khusus yang terlaksana dari yang direncanakan</p> <p>Mengukur tingkat siaga pencarian dan pertolongan dengan membandingkan antara:</p> <p>Indeks: (Rata-rata nilai A x 0.9) + (nilai B x0.1)</p>
		IKSP.5.2	Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	Nilai 1-100	<p>Pengukuran dari pelaksanaan latihan dengan mempertimbangkan perbandingan 3 aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan</p> <p>Indeks Pelaksanaan Lathan Pencarian dan Pertolongan = Rata-rata dari kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan</p>

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
		IKSP.5.3	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	<i>Response time</i> menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
SP.6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSP.6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	Nilai	Merupakan nilai indeks dari kepuasan dari masyarakat yang didapat dari survei kepuasan masyarakat
		IKSP.6.2	Waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	<p>Deployment time menghitung waktu unit pencarian dan pertolongan diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana. Indikator ini mengukur waktu tempuh yang terbagi berdasarkan lokasi kecelakaan (laut/perairan atau daratan)</p> <p>Cara menghitung <i>deployment time</i>:</p> <p>1. Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut) b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki) <p>2. Correction factors:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cuaca (<i>visibility, wind, ceiling, current, wave, precipitation</i>, siang/malam, dll) b. <i>Terrain</i> (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. <i>Traffic</i> (lancar, padat, macet) e. <i>Fatigue</i> (<i>yes/no</i>)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
		IKSP.6.3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi $= \frac{\text{Jumlah korban (selamat+meninggal)}}{\text{Total korban}} \times 100\%$

9. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK.5.1.1 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	IKSK. 5.1.1.a Indeks siaga pencarian dan pertolongan	Nilai	Mengukur tingkat siaga pencarian dan perolongan dengan membandingkan antara: A. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan mempertimbangkan perbandingan dari 4 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, fasilitas pendukung; B. Siaga khusus pencarian dan pertolongan, yaitu perbandingan siaga khusus yang terlaksana dari yang direncanakan Indeks: $(\text{Rata-rata nilai A} \times 0.9) + (\text{nilai B} \times 0.1)$
	IKSK. 5.1.1.b Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima sampai dengan unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSK. 5.1.1.c Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	Nilai	Pengukuran dari pelaksanaan latihan dengan mempertimbangkan perbandingan 3 aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan Indeks Pelaksanaan Lathan Pencarian dan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
			Pertolongan = Rata-rata dari 3 aspek penilaian
SK.5.2.1 Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 5.2.1.a Persentase rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan Latihan yang telah disusun	%	Menghitung persentase jumlah rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan latihan yang sudah disusun dibandingkan dengan yang direncanakan
	IKSK. 5.2.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan Latihan yang sudah terlaksana	%	Menghitung persentase rencana pengembangan dan evaluasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan

10. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT OPERASI TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK. 6.1.1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 6.1.1.a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	Indeks	Merupakan nilai indeks dari kepuasan dari masyarakat yang didapat dari survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi pencarian dan pertolongan
SK. 6.2.1	Meningkatnya kecepatan waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 6.2.1.a	Waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	<p>Deployment time= waktu unit pencarian dan pertolongan diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana. Cara menghitung deployment time:</p> <p>1. Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut) b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki) <p>2. <i>Correction factors</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cuaca (<i>visibility, wind, ceiling, current, wave, precipitation, siang/malam, dll</i>) b. Terrain (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. <i>Traffic</i> (lancar, padat, macet) e. <i>Fatigue</i> (<i>yes/no</i>) <p>$Rata2 = \frac{\text{Jumlah waktu tempuh operasi SAR}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$</p>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK. 6.3.1 Terwujudnya pelaksanaan koordinasi nasional dan/atau internasional dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 6.3.1.a Persentase peningkatan koordinasi operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah pelaksanaan koordinasi operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah realisasi koordinasi Operasi SAR}}{\text{Jumlah target koordinasi operasi SAR}} \times 100\%$
	IKSK. 6.3.1.b Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah operasi SAR dengan pelibatan potensi dibagi dengan jumlah operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah operasi SAR dengan potensi SAR}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100\%$
SK. 6.4.1 Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 6.4.1.a Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan kapal, pesawat udara, penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia	%	Menghitung persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi $\% = \frac{\text{jumlah korban yang terevakuasi}}{\text{jumlah total korban}} \times 100 \%$
	IKSK. 6.4.1.b Persentase keselamatan petugas pencarian dan pertolongan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah operasi pencarian dan pertolongan dengan <i>zero accident</i> bagi petugas pencarian dan pertolongan dibagi jumlah total operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah operasi SAR (zero accident)}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100\%$
	IKSK. 6.4.1.c Persentase uji fungsi dan uji kompetensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur jumlah uji fungsi/kompetensi dibagi jumlah target uji fungsi/kompetensi $\% = \frac{\text{Jumlah Uji fungsi/kompetensi}}{\text{Jumlah target uji fungsi/kompt}} \times 100\%$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
6.5.1 Terpenuhinya pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 6.5.1.a Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah realisasi dokumen $\% = \frac{\text{jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen}} \times 100 \%$
SK. 6.6.1 Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 6.6.1.a Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah kegiatan penyusunan rencana dan pengembangan $\% = \frac{\text{jumlah keg peny.renbang yg terselenggara}}{\text{jumlah target kegiatan}} \times 100 \%$
	IKSK. 6.6.1.b Persentase penyusunan dokumen norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah dokumen penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{jumlah dokumen yang terealisasi}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100$
	IKSK. 6.6.1.c Nilai SAKIP oleh APIP	Nilai	Mengukur penilaian SAKIP unit kerja berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)
	KSK. 6.6.1.d Hasil pengawasan kearsipan Internal	Nilai	Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan dari Biro Umum

11. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS UTAMA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
SP.7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.7.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	indikator ini bertujuan untuk dapat memantau pelaksanaan sistem merit di Basarnas berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan Berdasarkan hasil penilaian dari KASN
SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.8.1 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	%	Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Usulan RKBMN}}{\text{Jumlah Usulan RKBMN yang ditetapkan dalam RKBMN}} \right) \times 100\%$
	IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Opini	Mengukur penilaian laporan keuangan Basarnas yang dilakukan oleh BPK
SP.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.9.1 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi Informatif : 97- 100; Menuju Informatif : 80 - 96 Cukup Informatif : 60 – 79; Kurang Informatif : 40 - 59 Tidak Informatif : < 39
	IKSP.9.2 Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi SPBE berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB Memuaskan: 4.2 - 5.0; Sangat Baik: 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5; Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
SP.10 Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP.10.1 Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	%	Mengukur NSPK bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan $\% = \left(\frac{\text{Jumlah NSPK bidang pencarian dan pertolongan}}{\text{Jumlah NSPK yang ada}} \right) \times 100\%$
SP.11 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP.11.1 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan yang di tindaklanjuti $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Koordinasi dan Perjanjian kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100$
	IKSP.11.2 Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang diperoleh dibandingkan dengan target dukungan luar negeri. $\% = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Luar Negeri}}{\text{Jumlah Kegiatan Dukungan Luar Negeri yang direncanakan}} \times 100\%$
SP.12 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.12.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur hasil evaluasi laporan kinerja Basarnas yang dilakukan oleh Kementerian PANRB Berdasarkan Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP Kementerian PANRB AA: > 90 – 100, A: > 80 – 90, BB: > 70 – 80, B: > 60 – 70, CC: > 50 – 60, C: > 30 – 50, D: 0 – 30
	IKSP.12.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Mengukur hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan hasil penilaian RB dari Kementerian PANRB.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
	IKSP.12.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks	Mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang).
SP.13 Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)	IKSP.13.1 Level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i>	Level 1 s.d. Level 5	Berdasarkan hasil validasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas dengan kategori penilaian “Level 1”, “Level 2” dan “Level 3”.

12. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2020 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK.7.1.1 Meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai	IKSK.7.1.1.a Indeks Sistem Merit	Skala 0-4	Mengukur penerapan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Klasifikasi Indeks Sistem Merit: (1) Kategori IV, Nilai 325-400, Indeks 0.81-1, Predikat Sangat Baik (2) Kategori III, Nilai 250-325, Indeks 0.61-0.8, Predikat Baik (3) Kategori II, Nilai 175-249, Indeks 0.41-0.6, Predikat Kurang (4) Kategori I, Nilai 100-174, Indeks 0.2-0.4, Predikat Buruk
	IKSK.7.1.1.b Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	%	Persentase Hasil Survei Layanan Kepegawaian
SK10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK 10.1.1.a Persentase NSPK yang dihasilkan	%	Mengukur persentase NSPK yang ditetapkan % NSPK yang ditetapkan = $\frac{N1+N2}{2}$ N1 % Peraturan Badan yang ditetapkan = %Perban yang ditetapkan = $\frac{Jml. \text{ usulan Perban}}{Jml. \text{ Perban yang disahkan}} \times 100\%$ N2 % Instrumen Hukum lain yang ditetapkan = Instrumen Hukum yang ditetapkan = $\frac{Jml. \text{ usulan Instrumen Hukum}}{Jml. \text{ Instrumen Hukum yang disahkan}}$
	IKSK 10.1.1.b Persentase Kepuasan Layanan Informasi Hukum	Skala 1-5	Hasil survei kepuasan layanan informasi hukum

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK12.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKSK12.2.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	Skala 1 -4	Hasil Monitoring berdasarkan Permenpan 20 Tahun 2018 dengan pendekatan Dimensi Struktur dengan Skor: STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3 SS (Sangat Setuju) = 4
	IKSK12.2.1.b Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	%	Mengukur prosentase Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) %SOP yang disahkan = $\frac{\text{Jml. usulan SOP}}{\text{Jml. SOP yang disahkan}} \times 100\%$
	IKSK12.2.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Skala 1-4	Hasil survey kepada Pokja Reformasi Birokrasi dengan Pendekatan Aspek Ketepatan Penyampaian Informasi dengan Skor : STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3 SS (Sangat Setuju) = 4

13. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
SK.8.1.1	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK 8.1.1.a	Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum	%	Mengukur kepuasan pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi layanan pramubhakti, layanan keamanan di lingkungan kerja, layanan kebersihan ruangan dan halaman serta toilet pada Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah sampling}} \times 100\%$
		IKSK.8.1.1.b	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan	%	Mengukur kinerja penatausahaan BMN yang meliputi pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara $A \% = \frac{\text{Jumlah Analisa hasil RKBMN}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}} \times$ $B \% = \frac{\text{Jumlah pelaporan BMN yang sudah tepat}}{\text{Jumlah Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$ $C \% = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times$ $D \% = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times$ $E \% = \frac{\text{Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh penghapusan BMN}} \times$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\% + \sum D\% + \sum E\%)}{2} \times 100\%$
		IKSK.8.1.1.c	Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor	%	Mengukur efektivitas kegiatan operasional dan pemeliharaan peralatan kantor serta sarana gedung yang meliputi bangunan, halaman, instalasi dan jaringan serta kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
				$\% = \frac{\text{Jumlah layanan operasional kantor yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana layanan operasional dan pemeliharaan kantor}} \times 100\%$
		IKSK.8. 1.1.d	Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan	% Mengukur efektivitas kegiatan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan keprotokolalan}}{\text{Jumlah jadwal kegiatan keprotokolalan}} \times 100\%$
		IKSK.8. 1.1.e	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	% Mengukur pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok aparatur di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan pemenuhan sarana prasarana aparatur}}{\text{Jumlah rencana kegiatan pemenuhan sarana prasarana aparatur}} \times 100\%$
SK.8.2.1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK.8. 2.1.a	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	% Mengukur penyelesaian tindaklanjut rekomendasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI dan APIP $\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK-RI+APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$
		IKSK.8. 2.1.b	Persentase implementasi pengelolaan pelaksanaan anggaran yang berkualitas	% Mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan skor IKPA.

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK.8. 2.1.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan Peraturan PNB	%	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berupaya mewujudkan potensi pendapatan dari PNB untuk mendorong peningkatan pendapatan negara, melalui pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. % = $\frac{\text{Penerimaan PNB}}{\text{Target PNB}} \times 100\%$
SK.9.1.2	Meningkatnya kualitas layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.9. 1.2.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan	%	Indikator ini mengukur pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi melalui pengelolaan website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan % = $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan kehumasan}}{\text{Jumlah target kegiatan kehumasan}} \times 100\%$
		IKSK.9. 1.2.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	%	Mengetahui pelayanan publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan % = $\frac{\text{Jumlah responden puas}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
SK.12.3.1	Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal	IKSK.12 .3.1.a	Persentase unit kerja berpredikat “Baik” dalam pengawasan kearsipan internal	%	Mengukur efektifitas unit kerja baik unit kerja di Kantor Pusat maupun UPT dalam melaksanakan pengelolaan arsip yang sudah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kearsipan serta kaidah-kaidah kearsipan $\% = \frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang dinyatakan baik}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$
SK.8.3.1	Terwujudnya kualitas layanan pengadaan yang profesional	IKSK.8. 3.1.a	Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan	%	mengetahui penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang meliputi pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender dan swakelola baik proses pengadaan secara konvensional maupun pengadaan secara elektronik $\% = \frac{\text{Jumlah penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa}}{\text{Jumlah rencana pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$

14. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
SK. 11.1.1	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 11.1.1.a	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan. $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Kerjasama SAR}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja sama SAR yang direncanakan}} \right) \times 100\%$
		IKSK. 11.1.1.b	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	%	Indikator ini mengukur jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada melalui jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan. $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100\%$
SK. 12.1.1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK. 12.1.1.a	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%	Indikator ini mengukur rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Pengendalian program dan anggaran dilihat dari hasil pemantauan monitoring, pemantauan aplikasi, dan laporan berkala.
		IKSK. 12.1.1.b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja dari Kementerian PAN-RB

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 12.1.1.c Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	%	<p>Nilai penguatan akuntabilitas diperoleh dari hasil evaluasi pada LKE RB yang terdiri dari aspek:</p> <p>a. pemenuhan yaitu : keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja</p> <p>b. reform, yaitu: Efektifitas dan Efisiensi anggaran, pemanfaatan aplikasi akuntabilitas, pemberian reward dan punishment, kerangka logis kinerja.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi RB KemenPANRB</p>
		IKSK. 12.1.1.d Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	%	<p>Mengukur penilaian kinerja anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu.</p> <p>Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran</p>
SK. 12.1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK. 12.1.2.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	%	<p>Mengukur persentase jumlah anggaran yang diblokir dalam DIPA</p> $\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang diblokir}}{\text{Jumlah pagu anggaran pada DIPA}} \right) \times 100\%$
		IKSK. 12.1.2.b Persentase Ketepatan Waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan Dokumen Usulan Rencana dan Program	%	<p>Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menyerahkan dokumen usulan rencana dan program tepat waktu.</p> $\% = \frac{\text{Jumlah Unit Kerja dan UPT yang menyampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja dan UPT}} \times 100\%$
		IKSK. 12.1.2.c Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	%	<p>Mengukur persentase kesesuaian anggaran yang di peroleh dengan anggaran yang direncanakan</p> $\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang diperoleh}}{\text{Jumlah seluruh unit kerja dan UPT}} \right) \times 100\%$

15. INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumusan Perhitungan
SK. 9.1.1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK.9. 1.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	%	<p>Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan untuk penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis.</p> <p>A % = $\frac{\text{Jumlah Data yang terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan}}{\text{Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data}} * 100$</p> <p>B % = $\frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang teralisasi}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} * 100$</p> <p>% = $\frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$</p>
		IKSK. 9.1.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	%	<p>Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui survei dengan hasil nilai indeks</p> <p>% = $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi}}{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan}} * 100$</p>
		IKSK.9. 1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	<p>Mengukur hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, dengan kategori:</p> <p>Skor 97-100 = Informatif</p> <p>Skor 80-96 = Menuju Informatif</p> <p>Skor 60-79 = Cukup Informatif</p>

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumusan Perhitungan	
				Skor 40-59 = Kurang Informatif Skor < 39 = Tidak Informatif	
SK. 9.2.1	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.2.1.a	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	%	Mengukur hasil penilaian Sistem Informasi Berbasis Elektronik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - < 3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8
		IKSK. 9.2.1.b	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	%	Mengukur persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik $A \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $B \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $C \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime internet})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%)}{3} * 100$
		IKSK. 9.2.1.c	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	%	Mengukur persentase pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumusan Perhitungan
				$\% = (\text{jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun} / \text{total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun}) * 100$
SK. 9.3.1	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	IKSK. 9.3.1.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	%	Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun $A \% = \frac{(\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran})}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$ $B \% = \frac{(\text{jumlah penggunaan arsip})}{\text{jumlah berkas}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$
		IKSK.9. 3.1.b Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	%	Mengukur persentase pemenuhan kompetensi SDM yang tersertifikasi $\% = (\text{Jumlah SDM yang tersertifikasi} / \text{Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi tahun berjalan}) * 100$

16. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumusan Perhitungan
SK. 13.1.1	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	IKSK.13. 1.1.a Level Kapabilitas APIP;	Level	Hasil evaluasi/ <i>assessment</i> yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
		IKSK.13. 1.1.b Level Maturitas Implementasi SPIP;	Level	Hasil evaluasi/ <i>assessment</i> yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
		IKSK.13. 1.1.c Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	%	$\frac{(\sum \text{Satker yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal})}{\sum \text{Satker}} \times 100\%$
		IKSK.13. 1.1.d Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpredikat “baik” oleh inspektorat	Nilai	Nilai rata-rata laporan kinerja hasil evaluasi Inspektorat
		IKSK.13. 1.1.e Nilai Hasil Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi pada Komponen Penguatan Pengawasan	Nilai	Hasil evaluasi/ <i>assessment</i> yang diberikan oleh Kemenpan dan RB
		IKSK.13. 1.1.f Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan	%	$\frac{(\sum \text{Penyelenggara Negara yang telah melaporkan harta kekayaan})}{\sum \text{Penyelenggara Negara}} \times 100\%$
SK. 13.1.2	Meningkatnya dukungan pengawasan intern.	IKSK.13. 1.2.a Persentase APIP yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	%	$\frac{(\sum \text{APIP yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi})}{\sum \text{APIP}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumusan Perhitungan
		IKSK.13.1.2.b Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal	%	\sum Persentase Penyerapan Anggaran + \sum Persentase Pencapaian Output
		IKSK.13.1.2.c Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat	Nilai	Nilai evaluasi/ <i>assessment</i> yang diberikan oleh Pengawas Kearsipan Internal

17. INDIKATOR KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN	
SK. 14.1.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.1. a	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	menit	Menghitung rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ <p>Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p>
		IKSK. 14.1.1. b	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. % Jumlah Korban terevakuasi = (\sum Korban terevakuasi / \sum Total Korban) x 100%
		IKSK. 14.1.1. c	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	Nilai 1-100	Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKSK. Indeks kesiapsiagaan 14.1.2. Pencarian dan Pertolongan a (Utama)	Nilai 1-100	<p>Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.</p> <p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus</p> <p>% Pemenuhan petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah tim siaga / standart tim siaga) x 100%</p> <p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari <i>serviceable</i> / 365 hari) x 100 %</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100%</p>
SK. 14.1.3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. Persentase potensi pencarian 14.1.3. dan pertolongan yang dibina a (Utama)	%	<p>Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA</p> <p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan</p> <p>% = (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%</p>

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.4. a Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan. % = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100%
SK. 14.1.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.5. a Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. % = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah seluruh tenaga rescuer dan ABK Kantor SAR) x 100%
SK. 14.1.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.6. a Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana % = (Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN / jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas) x 100%
SK. 14.1.7		IKSK. 14.1.7. a Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IKSK. 14.1.7. b Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
		IKSK. 14.1.7. c Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

18. INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 15.1.1	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSK. Persentase kelulusan peserta 15.1.1. Diklat Aparatur dan Diklat a Teknis Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur Jumlah Peserta Diklat dalam setahun/ Jumlah Peserta diklat yang Lulus % = (Jumlah peserta diklat setahun / jumlah peserta diklat yang lulus dalam setahun) x 100%
		IKSK. Indeks kepuasan peserta 15.1.1. Diklat atas layanan Balai b Diklat	Nilai	Pelayanan Diklat pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek pelayanan diklat, materi, kesesuaian kurikulum, kualitas sarpras serta kompetensi pengajar. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan peserta diklat selama berada di balai diklat
SK. 15.1.2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasaran pencarian dan pertolongan	IKSK. Persentase Pemenuhan 15.1.2. Sarana dan Prasarana Balai a Diklat Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana % = (Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
				dalam simak BMN / jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas) x 100%
		IKSK. 15.1.2. b Persentase Kesiapan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan Sarana dan Prasarana Balai Diklat dalam setahun, %= (Jumlah Hari Serviceable Sarana dan Prasarana Balai Diklat/365 hari) x 100 %
SK. 15.1.3	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IKSK. 15.1.3. a Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		IKSK. 15.1.3. b Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
				layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan
		IKSK. Nilai SAKIP (APIP) 15.1.3. c	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
 NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 NOMOR: SK.KBSN- 78/PR.02.02/II/BSN-2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
 NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 2020-2024

Manual Indikator Kinerja
 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

IKSS.1	
Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan merupakan ketersediaan dan kesiapan layanan Pencarian dan Pertolongan (<i>service availability</i>) melalui keandalan dari penyediaan tenaga, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang mencerminkan kinerja layanan (<i>service performance</i>) dari operasi Pencarian dan Pertolongan.
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas.
	Formula
	A = % pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan = $\frac{\text{Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah tenaga pencarian dan pertolongan}} \times 100\%$ B = % pemenuhan sarana dan prasarana = $\frac{\text{Jumlah KPP, Pos PP yang sudah memiliki sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah KPP, Pos PP yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$ C = % pemenuhan sistem komunikasi = $\frac{\text{Jumlah sistem komunikasi yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah sistem komunikasi}} \times 100\%$
	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan = % = $\frac{(\%A + \%B + \%C)}{3} \times 100\%$
	Tujuan untuk mengukur kemampuan Basarnas dalam menyediakan layanan pencarian dan pertolongan dari sisi ketersediaan sumber daya pencarian dan pertolongan
Satuan Pengukuran:	Persen (%)
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kedeputian Bina Tenaga dan Bina Potensi, Kedeputian Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi			
Sumber Data:	Formasi Kebutuhan Pegawai, Laporan Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Laporan Pemenuhan Sistem Komunikasi			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSS.2		
Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan merupakan ketersediaan dan kesiapan layanan Pencarian dan Pertolongan (service availability) melalui keandalan dari penyediaan tenaga, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang mencerminkan kinerja layanan (service performance) dari operasi Pencarian dan Pertolongan.	
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	
	Formula	
	$A = \% \text{ kesiapan sarana dan prasarana}$ $= \frac{(\text{Jumlah sarana dan prasarana yang serviceable})}{(\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki})} \times 100\%$	
	$B = \% \text{ kesiapan perangkat \& peralatan sistem komunikasi}$ $= \frac{(\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang serviceable})}{(\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang dimiliki})} \times 100\%$	
	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan = $(\frac{(\%A+\%B)}{2}) \times 100\%$	
Tujuan		
untuk mengukur kemampuan Basarnas dalam menyediakan layanan pencarian dan pertolongan dari sisi keandalan/kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Kedeputian Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi			
Sumber Data:	Laporan kesiapan sarana dan prasarana, laporan perangkat dan peralatan sistem komunikasi			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSS.3		
Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan merupakan ketersediaan dan kesiapan layanan Pencarian dan Pertolongan (service availability) melalui keandalan dari penyediaan tenaga, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang mencerminkan kinerja layanan (service performance) dari operasi Pencarian dan Pertolongan.	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur jumlah SDM Basarnas meliputi ABK dan Rescuer, serta Potensi yang bersertifikat.	
	Formula	
	Persentase tenaga ABK, Rescuer dan Potensi yang telah memiliki sertifikat dihitung dari: A = Persentase tenaga ABK yang bersertifikat: = $\frac{\text{(Jumlah tenaga ABK yang memiliki sertifikat)}}{\text{(Jumlah tenaga ABK yang dimiliki Basarnas)}} \times 100\%$ B = Persentase tenaga Rescuer yang bersertifikat: = $\frac{\text{(Jumlah tenaga Rescuer yang memiliki sertifikat)}}{\text{(Jumlah tenaga Rescuer yang dimiliki Basarnas)}} \times 100\%$ C = Persentase Potensi pencarian dan pertolongan yang bersertifikat : = $\frac{\text{(Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang memiliki sertifikat)}}{\text{(Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dimiliki Basarnas)}} \times 100\%$ % = $\frac{(\%A + \%B + \%C)}{3} \times 100\%$	
	Tujuan	
	untuk mengetahui kompetensi SDM Basarnas dan Potensi untuk mendukung layangan pencarian dan pertolongan	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian, Direktorat Bina Tenaga, Direktorat Bina Potensi		
Sumber Data:	Data Kebutuhan Pegawai, Data Sertifikasi, SIMPEG		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

IKSS.4				
Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Basarnas selaku penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas layanan pencarian dan pertolongan, layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan layanan pembinaan potensi.			
	Formula			
	Indikator ini menghitung rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap: A. unit layanan pencarian dan pertolongan B. unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan C. unit layanan pembinaan potensi			
	Tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pencarian dan pertolongan, layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan layanan pembinaan potensi secara berkelanjutan			
Satuan Pengukuran:	Nilai Indeks			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi, Direktorat Sistem Komunikasi, dan Direktorat Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Laporan Hasil Survei IKM			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSS. 5	
Perspektif* :	Customer Perspective
Rencana Kinerja :	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Indikator ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)
	Formula
	$Response\ time = \frac{\sum T1 - T0}{Jumlah\ Respon}$
	Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita
Tujuan	meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan
Satuan Pengukuran:	menit
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kedeputan Operasi dan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
Sumber Data:	Data response time

Periode Pelaporan:

Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

IKSS.6				
Perspektif* :	Customer Perspective			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.			
	Formulasi			
	$\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
	Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penangggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Data operasi pencarian dan pertolongan			
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Direktorat Sarana dan Prasarana**

IKSK.3.1.1.a		
Perspektif* :	-	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan darat terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR	
	Formula	
	Jumlah sarana SAR darat yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal sarana x 100 %	
	Tujuan	
Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan darat terhadap Standar Kebutuhan sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan rencana pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat tahun selanjutnya		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT	

Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Permintaan Kebutuhan Sarana dari UPT		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.3.1.1.b**Perspektif* :****Rencana Kinerja :**

Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas

Deskripsi Rencana Kinerja:

Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional

Indikator Kinerja Individu:

Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan laut

Deskripsi Indikator Kinerja Individu:

Definisi

Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan laut terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR

Formula

$$\frac{\text{Jumlah sarana SAR laut yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal sarana}} \times 100 \%$$

Tujuan

Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan laut terhadap Standar Kebutuhan sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan rencana pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut tahun selanjutnya

Satuan Pengukuran:

Persen (%)

Jenis Indikator Kinerja: Outcome Output dengan tingkat kendali rendah**Unit/Penanggung jawab IK:**

Direktorat Sarana dan Prasarana

Unit/Pihak Penyedia Data:

Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT

Sumber Data:

Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Permintaan Kebutuhan Sarana dari UPT

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
---------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------

IKSK.3.1.1.c

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan udara			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan udara terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR			
	Formula			
	Jumlah sarana SAR laut yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal sarana x 100 %			
	Tujuan			
	Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan udara terhadap Standar Kebutuhan sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan rencana pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara tahun selanjutnya			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - Direktorat Operasi			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.3.1.1.d

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Peralatan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR			
	Formula			
	Jumlah peralatan SAR yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal peralatan x 100 %			
	Tujuan			
	Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan peralatan SAR			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Permintaan Kebutuhan Sarana dari UPT			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.3.1.1.e				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan prasarana SAR			
	Formula			
	Jumlah prasarana SAR yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal prasarana x 100 %			
	Tujuan			
	Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan prasarana SAR			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT - Kementerian PUPR			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.3.1.1.f

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana			
	Formula			
	Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana			
	Tujuan Untuk mengukur Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana			
Satuan Pengukuran:	Dokumen			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - UPT			
Sumber Data:	Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan

IKSK.3.1.1.g

Perspektif* :			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional		
Indikator Kinerja Individu:	Jumlah norma/ standar/ prosedur /kriteria sarana dan prasarana yang telah disahkan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah norma/ standar/ prosedur /kriteria sarana dan prasarana yang telah disahkan		
	Formula		
	Jumlah norma/ standar/ prosedur /kriteria sarana dan prasarana yang telah disahkan		
	Tujuan Untuk mengukur jumlah norma/ standar/ prosedur /kriteria sarana dan prasarana yang telah disahkan		
Satuan Pengukuran:	Dokumen		
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Hukum dan Kepegawaian		
Sumber Data:	Data inventarisasi, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

IKSK.3.2.1.a

Perspektif* :			
----------------------	--	--	--



Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sarana dan prasarana yang berkualitas sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta			
	Formula			
	Jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan / jumlah dukungan yang diminta			
	Tujuan			
Untuk mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta				
Satuan Pengukuran:	Persentase (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.3.2.1.b**Perspektif* :****Rencana Kinerja :**

Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana

Deskripsi Rencana Kinerja:

Sarana dan prasarana yang berkualitas sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan

Indikator Kinerja Individu:

Persentase penerapan materi pembinaan teknis

Deskripsi Indikator Kinerja Individu:

Definisi

Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat penerapan materi pembinaan teknis pada pengelolaan sarana dan prasarana di unit kerja

Formula

Jumlah peserta pembinaan teknis/jumlah peserta yang menerapkan materi pembinaan teknis di Unit Kerja

Tujuan

Untuk mengukur kesesuaian tingkat penerapan materi pembinaan teknis pada pengelolaan sarana dan prasarana di unit kerja

Satuan Pengukuran:

Persen (%)

Jenis Indikator Kinerja: Outcome Output dengan tingkat kendali rendah**Unit/Penanggung jawab IK:**

Direktorat Sarana dan Prasarana

Unit/Pihak Penyedia Data:

Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - Direktorat Bina Tenaga - UPT

Sumber Data:

Data kegiatan pelatihan peserta pembinaan teknis

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

IKSK.3.2.1.c

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sarana dan prasarana yang berkualitas sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Sarana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun			
	Tujuan Untuk mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - Direktorat Bina Tenaga - UPT			
Sumber Data:	Data kegiatan pelatihan pembinaan teknis			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.3.2.1.d

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sarana dan prasarana yang berkualitas sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan perbekalan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah dukungan Perbekalan yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta			
	Formula			
	Jumlah dukungan Perbekalan yang diberikan/ jumlah dukungan yang diminta			
	Tujuan			
	Untuk mengukur jumlah dukungan Perbekalan yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.3.3.1.a

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana darat/365 hari x 100 %			
	Tujuan			
	Untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.3.3.1.b

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut dalam setahun			
	Formulasi			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana laut/365 hari x 100 %			
	Tujuan			
	Untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana dan Data pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.3.3.1.c

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana udara/365 hari x 100 %			
	Tujuan			
	Untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana dan Data pelaksanaan pemeliharaan sarana udara			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.3.3.1.d

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Peralatan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> peralatan /365 hari x 100 %			
	Tujuan Untuk mengukur kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Pencarian dan Pertolongan dan Data pelaksanaan pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.3.3.1.e

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Prasarana Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> prasarana /365 hari x 100 %			
	Tujuan			
	Untuk mengukur kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Pencarian dan Pertolongan dan Data pelaksanaan pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.3.3.1.f

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesesuaian data inventarisasi sarana dan prasarana dengan fisik			
	Formula			
	Jumlah laporan <i>updating</i> data sarana dan prasarana			
	Tujuan Untuk mengukur kesesuaian data inventarisasi sarana dan prasarana dengan fisik			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - UPT			
Sumber Data:	Laporan Bulanan UPT			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Direktorat Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

IKSK. 4.1.1.a			
Perspektif* :	<i>Internal process</i>		
Rencana Kinerja :	Pemenuhan norma standard prosedur dan petunjuk teknis yang		
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional</i>		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase norma standard prosedur dan petunjuk teknis yang disahkan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Indikator ini mengukur jumlah norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis yang disahkan dibanding dengan yang direncanakan		
	Formula		
	$\% = \frac{\text{Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang telah disahkan}}{\text{Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang direncanakan}} \times 100 \%$		
	Tujuan Untuk mengukur pemenuhan NSPK yang telah disahkan terhadap NSPK yang direncanakan.		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Biro Perencanaan - UPT		
Sumber Data:	Data Manual Book Peralatan Komunikasi, Data Standart Operation Prosedur (SOP) Peralatan Komunikasi dan Data dukung Nota Kesepahaman di Bidang Komunikasi		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IIKSK. 4.1.1.b

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Pemenuhan dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang peralatan komunikasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi terhadap Standar Kebutuhan Peralatan Komunikasi			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah Peralatan Komunikasi yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
	Untuk mengukur pemenuhan peralatan komunikasi terhadap Standar Kebutuhan Peralatan yang telah disusun.			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Biro Perencanaan - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Komunikasi, Data Standardisasi Kebutuhan Peralatan Komunikasi, Data Permintaan dari UPT			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK. 4.1.1.c

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Pemenuhan Dokumen Evaluasi di Bidang Sistem Komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Dokumen evaluasi yang berkualitas menentukan keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan di Bidang Komunikasi			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Dokumen Evaluasi di Bidang Sistem Komunikasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur pemenuhan terhadap dokumen evaluasi di bidang Sistem Komunikasi			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi yang dipenuhi}}{\text{Jumlah dokumen evaluasi yang direncanakan}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
	Untuk mengukur pemenuhan terhadap dokumen evaluasi yang disusun setiap tahunnya.			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - UPT			
Sumber Data:	Data Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Sistem Komunikasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK. 4.1.1.d				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Pelaksanaan Tata Usaha dan Kearsipan dalam mendukung kegiatan dan anggaran Direktorat Sistem Komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan yang baik di bidang Sistem Komunikasi.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Tata usaha dan kearsipan dalam mendukung kegiatan Direktorat Sistem Komunikasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur dokumen SAKIP dan Arsiparis.			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah dokumen yang dipenuhi}}{\text{Jumlah dokumen yang direncanakan}} \times 100 \%$			
	Tujuan Untuk persentase pemenuhan dokumen SAKIP dan Arsiparis dalam satu tahun anggaran.			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Biro Perencanaan - UPT			
Sumber Data:	Data SAKIP, Data Arsiparis.			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(x) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK. 4.2.1.a

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya.			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan kebijakan di bidang sistem komunikasi meliputi proses pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah kegiatan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	Jumlah dukungan sistem komunikasi yang di laksanakan / jumlah dukungan sistem komunikasi yang direncanakan			
	Tujuan untuk mengukur jumlah kegiatan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - UPT - Stakeholder di Bidang Komunikasi			
Sumber Data:	Data Kegiatan Profisiensi, Data Kegiatan Latihan Gelar Komunikasi			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 4.2.1.b				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya.			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan kebijakan di bidang sistem komunikasi meliputi proses pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat false alert yang terdeteksi di Indonesia, Semakin kecil tingkat false alert maka semakin baik penilaiannya.			
	Formula			
	$\frac{(\text{false alerts world-wide with Participant's country code(s)} + \text{undetermined alerts world-wide with Participant's country code(s)})}{\text{estimated total number of beacons with Participant's country code(s)}}$			
	Tujuan			
Untuk meminimalkan jumlah false alert yang terdeteksi di Indonesia, sehingga dapat sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Cospas-Sarsat.				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Pemilik Radio Beacon - UPT			
Sumber Data:	Data deteksi MEOLUT, Hasil pemeriksaan radio beacon			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 4.2.1.c

Perspektif* :	
Rencana Kinerja :	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya.
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan kebijakan di bidang sistem komunikasi meliputi proses pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Jumlah data Registrasi dan Sertifikasi Sinyal Marabahaya
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah data registrasi radio beacon yang terdaftar di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	Formula
	Jumlah data registrasi radio beacon dalam satu tahun
	Tujuan Untuk mengukur jumlah registrasi radio beacon yang terdaftar di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Satuan Pengukuran:	data
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome (V) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pemilik Radio Beacon - UPT
Sumber Data:	Data registrasi radio beacon
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

IKSK. 4.3.1.a				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan kebijakan di bidang sistem komunikasi meliputi proses pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi yang siap digunakan dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> / 365 hari x 100 %			
	Tujuan Untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi dalam setahun, serta meningkatkan jumlah peralatan yang <i>serviceable</i> dan dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Komunikasi - Data kerusakan peralatan			
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 4.3.1.b		
Perspektif* :		
Rencana Kinerja :	Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan kebijakan di bidang sistem komunikasi meliputi proses pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keakuratan data peralatan komunikasi	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Merupakan instrumen untuk mengukur keakuratan data inventarisasi dan data peralatan komunikasi yang telah terverifikasi	
	Formula	
	Dilakukan pembobotan untuk mengetahui keakuratan data inventarisasi dan data pemeliharaan Adapun bobot yang digunakan adalah: Bobot Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi : 60% Bobot Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi : 20% Bobot Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater : 20%	
	rumus = (Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi x 60%) + (Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi x 20%) + (Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater x 20%)	
	Tujuan	
	Untuk mengukur keakuratan data inventarisasi dan data peralatan komunikasi yang telah terverifikasi di Kantor Pusat maupun di UPT	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - UPT - Perum LPP TVRI - Kemenkominfo	

Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Komunikasi - Data Sewa Tower - Data Izin Stasiun Radio (ISR)			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 4.4.1.a										
Perspektif* :	<i>Customer perspective</i>									
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)									
Deskripsi Rencana Kinerja:	Alat pemancar sinyal marabahaya merupakan perangkat elektronik yang terpasang di setiap kapal untuk diaktifkan pada saat situasi mengancam jiwa agar petugas penyelamat segera menemukan lokasi dan memberikan pertolongan. Kepuasan masyarakat pada layanan registasi alat pemancar sinyal marabahaya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran operator kapal untuk mendaftarkan perangkat beacon yang dimiliki.									
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)									
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi									
	Merupakan instrumen untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan radio beacon di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan									
	Formula									
	$IKM = (\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur} / \text{Total Unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$									
	adapun range indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:									
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Klasifikasi</th> <th>Range</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>81.26 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>62.51 - 81.25</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>43,76 - 62.50</td> </tr> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>25 - 43.75</td> </tr> </tbody> </table>	Klasifikasi	Range	Sangat Baik	81.26 - 100	Baik	62.51 - 81.25	Kurang Baik	43,76 - 62.50	Tidak Baik
Klasifikasi	Range									
Sangat Baik	81.26 - 100									
Baik	62.51 - 81.25									
Kurang Baik	43,76 - 62.50									
Tidak Baik	25 - 43.75									
Tujuan	Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan radio beacon di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan									
Satuan Pengukuran:	Indeks									
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah								
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komuniaksi									
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pemilik radio beacon									
Sumber Data:	Data survei terhadap pelayanan radio beacon									

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Kedeputan Operasi dan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan

IKSP 5.2			
Perspektif* :	Layanan Masyarakat		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Peningkatan kesiapsiagaan dari aspek penilaian pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks siaga pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Pengukuran dari pelaksanaan: A. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan mempertimbangkan perbandingan dari 4 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, fasilitas pendukung; B. Siaga khusus pencarian dan pertolongan, yaitu perbandingan siaga khusus yang terlaksana dari yang direncanakan		
	Formula		
	Indeks Siaga Pencarian dan Pertolongan : = ((Rata-rata nilai A x 0,9)+(Nilai B x 0,1))		
	Tujuan Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan siaga, sehingga dapat diinventarisir kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan siaga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya		
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan		
Sumber Data:	Rekap data siaga rutin dan siaga khusus		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

IKSP 5.2	
Perspektif* :	Meningkatkan Koordinasi
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Peningkatan kesiapsiagaan dari aspek penilaian pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Pengukuran dari pelaksanaan latihan dengan mempertimbangkan perbandingan 3 aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan
	Formula
	Indeks Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan = Rata-rata dari kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan
	Tujuan Untuk mengetahui 1. Sejauh mana jumlah peserta latihan yang sudah memenuhi kualifikasi dan yang belum memenuhi kualifikasi, 2. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan latihan, 3. Pelaksanaan latihan sudah sesuai prosedur apa belum.
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan
Sumber Data:	Rekap pelaksanaan latihan
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP 5.3				
Perspektif* :	Layanan Masyarakat			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Peningkatan kesiapsiagaan dari aspek waktu tanggap pada saat terima informasi terjadinya kecelakaan atau bencana			
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan			
	Formula			
	$\text{Rata - rata waktu tanggap} = \frac{\text{Jumlah waktu tanggap}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$			
	Tujuan			
Mengukur kecepatan dalam menanggapi informasi terjadinya kecelakaan atau bencana				
Satuan Pengukuran:	Menit			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan			
Sumber Data:	Berita SAR			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSP 6.1		
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, dan untuk pelaksanaan survey IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Merupakan nilai Indeks dari kepuasan dari masyarakat yang didapat dari survei kepuasan masyarakat	
	Formula	
	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	
	Tujuan	
	Upaya mengevaluasi kinerja unit layanan operasi pencarian dan pertolongan secara terukur dan mengacu kepada standar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, serta sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, sebagai penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	
Satuan Pengukuran:	Indeks	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi		
Sumber Data:	Survei Kepuasan Masyarakat		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

IKSP. 6.2		
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	waktu unit pencarian dan pertolongan diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana	
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Menghitung waktu yang diperlukan dari SRU diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana.	
	Formula	
	Cara menghitung deployment time: 1. Variabel: a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut) b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki) 2. Correction factors: a. Cuaca (visibility, wind, ceiling, current, wave, precipitation, siang/malam, dll) b. Terrain (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. Traffic (lancar, padat, macet) e. Fatigue (yes/no) Rata - rata waktu tempuh = $\frac{\text{Jumlah waktu tempuh}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$	
	Tujuan	
Mengukur kecepatan waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Menit	
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi		
Sumber Data:	Berita SAR		
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

IKSP 6.3

Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 bahwa keberhasilan evakuasi yang tinggi merupakan salah satu hal pokok dalam kepentingan pengguna jasa (<i>customers</i>) terkait layanan (<i>service</i>) pencarian dan pertolongan	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana	
	Formula	
	$\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\text{Jumlah Korban yang dievakuasi}}{\text{Jumlah total Korban}} \times 100 \%$	
	Tujuan	
Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi	
Sumber Data:	Berita SAR, Laporan Operasi	

Periode Pelaporan:

Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Direktorat Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan

IKSK 5.1.1.a	
Perspektif* :	Layanan Masyarakat
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mewujudkan pelaksanaan siaga dan latihan yang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
Indikator Kinerja Individu:	Indeks siaga pencarian dan pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Pengukuran dari pelaksanaan: A. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan mempertimbangkan perbandingan dari 4 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, fasilitas pendukung; B. Siaga khusus pencarian dan pertolongan, yaitu perbandingan siaga khusus yang terlaksana dari yang direncanakan
	Formula
	Indeks Siaga Pencarian dan Pertolongan = $((\text{Rata-rata nilai A} \times 0,9) + (\text{Nilai B} \times 0,1))$
	Tujuan
	Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan siaga, sehingga dapat diinventarisir kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan siaga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan - Subdit Siaga dan Latihan
Sumber Data:	Rekap data siaga rutin dan siaga khusus

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

IKSK 5.1.1.b				
Perspektif* :	Layanan Masyarakat			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mewujudkan pelaksanaan siaga dan latihan yang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan			
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan			
	Formula			
	Rata - rata waktu tanggap = $\frac{\text{Jumlah waktu tanggap}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$			
	Tujuan			
Mengukur kecepatan dalam menanggapi informasi terjadinya kecelakaan atau bencana				
Satuan Pengukuran:	Menit			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Kesiapsiagaan - Subdit Siaga dan Latihan			
Sumber Data:	Berita SAR			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK 5.1.1.c	
Perspektif* :	Meningkatkan Koordinasi
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mewujudkan pelaksanaan siaga dan latihan yang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
Indikator Kinerja Individu:	Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Pengukuran dari pelaksanaan latihan dengan mempertimbangkan perbandingan 3 aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan
	Formula
	Indeks Pelaksanaan Lathan Pencarian dan Pertolongan = Rata-rata dari 3 aspek penilaian
	Tujuan Untuk mengetahui 1. Sejauh mana jumlah peserta latihan yang sudah memenuhi kualifikasi dan yang belum memenuhi kualifikasi, 2. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan latihan, 3. Pelaksanaan latihan sudah sesuai prosedur apa belum.
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan - Subdit Siaga dan Latihan
Sumber Data:	Rekap pelaksanaan latihan
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 5.2.1.a

Perspektif* :	-			
Rencana Kinerja :	Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Norma, standar, prosedur, kriteria, rencana pengembangan, dan evaluasi yang telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan Latihan yang telah disusun			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung persentase jumlah rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan latihan yang sudah disusun dibandingkan dengan yang direncanakan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah rancangan NSPK yang sudah disusun}}{\text{Jumlah rancangan NSPK yang direncanakan}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Menghitung rancangan NSPK yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan siaga dan latihan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan - Perencanaan dan Standardisasi			
Sumber Data:	Rekap penyusunan NSPK			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.5.2.1.b

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Norma, standar, prosedur, kriteria, rencana pengembangan, dan evaluasi yang telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan Latihan yang sudah terlaksana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung persentase rencana pengembangan dan evaluasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah rencana pengembangan dan evaluasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana pengembangan dan evaluasi yang direncanakan}} \times 100\%$			
	Tujuan			
	Menginventarisir kendala dan permasalahan yang terjadi sebagai bahan untuk evaluasi dan pengembangan di bidang siaga dan latihan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan - Perencanaan dan Standardisasi			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan

IKSK 6.1.1.a		
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, dan untuk pelaksanaan survey IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Merupakan nilai indeks dari kepuasan dari masyarakat yang didapat dari survei kepuasan masyarakat	
	Formula	
	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	
	Tujuan	
	Upaya mengevaluasi kinerja unit layanan operasi pencarian dan pertolongan secara terukur dan mengacu kepada standar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, serta sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, sebagai penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	
Satuan Pengukuran:	Indeks	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Operasi - Perencanaan dan Pengembangan		
Sumber Data:	Survei Kepuasan Masyarakat		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 6.2.1.b				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	waktu unit pencarian dan pertolongan diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana			
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu yang diperlukan dari SRU diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana			
	Formula			
	Rata - rata waktu tempuh = $\frac{\text{Jumlah waktu tempuh}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$			
	Tujuan			
Mengukur kecepatan waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Menit			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)			
Sumber Data:	Berita SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK 6.3.1.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi nasional dan/atau internasional dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan koordinasi operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase jumlah pelaksanaan koordinasi operasi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah realisasi koordinasi Operasi SAR}}{\text{Jumlah target koordinasi operasi SAR}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Untuk menciptakan sinergitas bersama dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK 6.3.1.b				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi nasional dan/atau internasional			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwenang mengerahkan dan mengendalikan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung persentase jumlah operasi pencarian dan pertolongan dengan pelibatan potensi dibagi dengan jumlah operasi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah Operasi SAR dengan potensi SAR}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100\%$			
	Tujuan			
menghitung jumlah pelibatan potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(x) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK 6.4.1.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 bahwa keberhasilan evakuasi yang tinggi merupakan salah satu hal pokok dalam kepentingan pengguna jasa (<i>customers</i>) terkait layanan (<i>service</i>) pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan kapal, pesawat udara, penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
	Formula			
	$\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\text{Jumlah Korban yang dievakuasi}}{\text{Jumlah total Korban}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
	Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)			
Sumber Data:	Berita SAR, Laporan Operasi			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK 6.4.1.b				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 bahwa keberhasilan evakuasi yang tinggi merupakan salah satu hal pokok dalam kepentingan pengguna jasa (<i>customers</i>) terkait layanan (<i>service</i>) pencarian dan pertolongan, terkait hal tersebut maka perlunya keselamatan (<i>Zero Accident</i>) juga bagi para petugas pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keselamatan petugas pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung jumlah operasi pencarian dan pertolongan dengan <i>zero accident</i> bagi petugas pencarian dan pertolongan dibagi jumlah total operasi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah Operasi SAR (Zero Accident)}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
	Mengukur keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dengan <i>Zero Accident</i>			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)			
Sumber Data:	Laporan Operasi			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK 6.4.1.c			
Perspektif* :	Learning and Growth		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-83/OT.05/II/BSN-2021 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyebutkan bahwa salah satu uraian tugas Direktur Operasi melaksanakan uji fungsi dan uji kompetensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan standar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase uji fungsi dan uji kompetensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengukur jumlah uji fungsi/kompetensi dibagi jumlah target uji fungsi/kompetensi		
	Formula		
	$\% = \frac{\text{Jumlah Uji Fungsi/Kompetensi}}{\text{Jumlah Target Uji Fungsi/Kompetensi}} \times 100 \%$		
	Tujuan		
dilaksanakan uji fungsi/kompetensi di setiap kantor pencarian dan pertolongan sehingga para personil selalu siap siaga jika kecelakaan/bencana/KMM terjadi			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)		
Sumber Data:	Laporan Kegiatan		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (x) Tahunan

IKSK 6.5.1.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terpenuhinya pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi pengelolaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase jumlah realisasi dokumen dari jumlah operasi pada indikator kerja dimaksud			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{Jumlah dokumen}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
(1) Penyiapan surat perintah, prosedur perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, penyiapan personil, sarana, logistik dan perbekalan operasi pencarian dan pertolongan; (2) Pembinaan serta penyelesaian administrasi biaya operasi pencarian dan pertolongan yang akuntabel.				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Substansi Dukungan Operasi			
Sumber Data:	Dokumen administrasi pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK 6.6.1.a		
Perspektif* :	Learning and Growth	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan operasi pencarian dan pertolongan, serta pemantauan penilaian analisis dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur persentase jumlah kegiatan penyusunan rencana dan pengembangan	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jumlah kegiatan renbang yang terselenggara}}{\text{Jumlah target kegiatan}} \times 100 \%$	
	Tujuan	
	1. Untuk mensosialisasi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan, bimbingan teknis penyusunan rencana kontingensi, 2. Evaluasi operasi akan dijadikan bahan pengembangan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam bidang operasi pencarian dan pertolongan, sehingga pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilakukan lebih baik lagi, serta bahan untuk menyempurnakan peraturan, SOP, dalam bidang operasi pencarian dan pertolongan	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Substansi Perencanaan dan Pengembangan		
Sumber Data:	Laporan Kegiatan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 6.6.1.b

Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penyusunan dokumen norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase jumlah dokumen penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang operasi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah dokumen yang terealisasi}}{\text{Jumlah target dokumen}} \times 100 \%$			
	Tujuan norma, standar, prosedur, dan kriteria akan dapat dijadikan pedoman, petunjuk teknis bagi Badan Nasional Pencarian Pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Substansi Perencanaan dan Pengembangan			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK 6.6.1.c	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP oleh APIP
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
	Formula
	Sesuai dengan Permenpan No.88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi empat komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 30%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 25%
	Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang
Tujuan	
memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Indikator	

Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendala rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi	
Sumber Data:	Hasil Evaluasi APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan
	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 6.6.1.d		
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan arsip di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Indikator Kinerja Individu:	Hasil pengawasan kearsipan Internal	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Nilai dan kategori atas hasil pengwasan kearsipan dari Biro Umum	
	Formula	
	Penilaian terdiri dari aspek/sub aspek: (1) Pengelolaan arsip dinamis (6.800) a. Penciptaan arsip (3.200) b. Penggunaan arsip (700) c. Pemeliharaan arsip (1.700) d. Penyusutan arsip (1.200) (2) Sumber Daya Kearsipan (3.400) a. SDM kearsipan (1.300) b. Prasarana dan sarana kearsipan (2.100)	
	Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan bahwa Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Nilai > 90-100: Kategori AA (Sangat Memuaskan) (2) Nilai > 80-90: Kategori A (Memuaskan) (3) Nilai >70-80: Kategori BB (Sangat Baik) (4) Nilai >60-70: Kategori B (Baik) (5) Nilai >50-60: Kategori CC (Cukup) (6) Nilai >30-50: Kategori C (Kurang) (7) Nilai 0-30: Kategori D (Sangat Kurang)	
	Tujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak - hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	
Satuan Pengukuran:	Nilai	
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi		
Sumber Data:	Hasil Pengawasan kearsipan Internal Basarnas		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Utama**

IKSP.7.1	
Perspektif* :	<i>Learn and Growth</i>
Rencana Kinerja :	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap instansi Pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Merit.
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
	Formula
	berdasarkan penilaian dari KASN
Tujuan	indikator ini bertujuan untuk dapat memantau pelaksanaan sistem merit di Basarnas, serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama
Unit/Pihak Penyedia Data:	KASN - Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas

Sumber Data:	KASN			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.8.1		
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Hasil dari kualifikasi laporan keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi salah satu output kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Utama. Laporan Keuangan mengaju pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).	
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jumlah usulan RKBMN}}{\text{Jumlah usulan RKBMN yang ditetapkan dalam RKBMN}} \times 100\%$	
	Tujuan	
	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN di Basarnas, serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum	
Sumber Data:	SIMAK-BMN, KPKNL, BA Rekonsiliasi, BAST	

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

IKSP.8.2		
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Hasil dari kualifikasi laporan keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi salah satu output kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Utama. Laporan Keuangan mengaju pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).</p>	
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/ Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya	
	Formula	
	Indeks Opini BPK : WTP; WDP; Adverse; Disclaimer	
	Tujuan	
untuk mengetahui kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN		
Satuan Pengukuran:	Opini BPK	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama		
Unit/Pihak Penyedia Data:	BPK - Biro Umum Basarnas		
Sumber Data:	Laporan Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Basarnas		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.9.1	
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Basarnas dapat ditingkatkan melalui perwujudan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/penerapan SPBE. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.
Indikator Kinerja Individu:	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik
	Formula
	Skor KIP diperoleh dari hasil penilaian Komisi Informasi dengan kategori: - 97- 100 : Informatif (Zona Hijau) - 80 - 96 : Menuju Informatif - 60 – 79 : Cukup Informatif (Zona Kuning) - 40 - 59 : Kurang Informatif (Zona Merah) - < 39 : Tidak Informatif (Zona Hitam)
	Tujuan
	Hasil rekomendasi dari Komisi Informasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di lingkungan Basarnas untuk tahun berikutnya.
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Indikator	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah

Kinerja:	() Satisfactory	() Satisfactory dengan catatan mengenai kemajuan
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Komisi Informasi - Pusat Data dan Informasi Basarnas	
Sumber Data:	Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Indonesia tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik pada Badan Publik	
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan
	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.9.2		
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Basarnas dapat ditingkatkan melalui perwujudan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/penerapan SPBE. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya	
Indikator Kinerja Individu:	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah	
	Formula	
	Evaluasi SPBE akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan maturity level) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap qesioner yang terbagi menjadi 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator dengan nilai skala indeks: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8	
	Tujuan	
	SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Basarnas dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE	
Satuan Pengukuran:	Nilai Indeks	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PAN-RB - Pusat Data dan Informasi Basarnas			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi KemenPAN RB tentang SPBE			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.10.1		
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan regulasi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	merupakan instrumen untuk mengukur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	
	Formula	
	Mengukur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan $\% = \frac{\text{(Jumlah NSPK bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan)}}{\text{(Jumlah NSPK yang ada)}} \times 100\%$	
	Tujuan	
	Indikator ini bertujuan agar regulasi yang ditetapkan di Basarnas lebih efektif, sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan dengan baik.	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian	
Sumber Data:	JDIH - Aplikasi IKK	

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

IKSP.11.1		
Perspektif* :	(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)□	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral</p>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang SAR yang di tindaklanjuti	
	Formula	
	$\% = (\text{Jumlah Koordinasi dan Perjanjian kerja Sama yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}) \times 100\%$	
	Tujuan	
	agar perjanjian kerja sama yang ada dapat ditindaklanjuti melalui penguatan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Substansi Kerja sama	

Sumber Data:	Data Kerja sama / MOU / PKS			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.11.2		
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan urban SAR. Dukungan-dukungan dari instansi maupun lembaga luar negeri berupa kegiatan-kegiatan dan kerja sama sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Indikator ini mengukur persentase jumlah dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang diperoleh dibandingkan dengan target dukungan luar negeri.	
	Formula	
	$\% = ((\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Luar Negeri}) / (\text{Jumlah Kegiatan Dukungan Luar Negeri yang direncanakan})) \times 100\%$	
	Tujuan	
	untuk mengetahui dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Substansi Kerja Sama			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.12.1		
Perspektif* :		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas kelembagaan yang baik diperoleh dari implementasi SAKIP, implementasi Reformasi Birokrasi, serta pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	
	Formula	
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)	
	Nilai hasil evaluasi AKIP: Predikat AA (Nilai > 90 –100) - Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai > 80 – 90) - Memuaskan Predikat BB (Nilai > 70 – 80) - Sangat Baik Predikat B (Nilai > 60 - 70) - Baik Predikat CC (Nilai > 50 – 60) - Cukup (Memadai) Predikat C (Nilai > 30 – 50) - Kurang Predikat D (Nilai > 0 – 30) - Sangat Kurang	
Tujuan		
	Mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.	
Satuan Pengukuran:	Nilai	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PANRB - Biro Perencanaan		
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.12.2	
Perspektif* :	<i>Stakeholder perspective</i>
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas kelembagaan yang baik diperoleh dari implementasi SAKIP, implementasi Reformasi Birokrasi, serta pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.
	Formula
	Penilaian terdiri dari 2 komponen, yaitu: 1. Komponen Pengungkit (60%) mencakup : a. Aspek Pemenuhan (20%) yaitu : - Manajemen Perubahan (2%); - Deregulasi Kebijakan (2%); - Penataan Organisasi (3%); - Penataan Tatalaksana (2,5%); - Penataan Manajemen SDM (3%); - Penguatan Akuntabilitas (2,5%); - Penguatan Pengawasan (2,5%); - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%) b. Aspek Hasil Antara (10%) yaitu : - Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); - Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); - Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); - Kualitas Pengelolaan Aset (1%); - Merit System (1%); - ASN Profesional (1%); - Kualitas Perencanaan (1%); - Maturitas SPIP (1%); - Kapabilitas APIP (1%); - Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan(1%)

	<p>c. Aspek Reform (30%) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Perubahan (3%); - Deregulasi Kebijakan (3%); - Penataan Organisasi (4.5%); - Penataan Tatalaksana (3,75%); - Penataan Manajemen SDM (4.5%); - Penguatan Akuntabilitas (3,75%); - Penguatan Pengawasan (3,75%); - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%) <p>2. Hasil (40%) mencakup:</p> <p>a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK (3%) - Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%) <p>b. Kualitas Pelayanan Publik (10%), yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan</p> <p>c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%), yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi</p> <p>d. Kinerja Organisasi (10%), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Kinerja (5%) - Kinerja Lainnya (2%) - Survei Internal Organisasi (3%) 		
	Tujuan		
	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.		
Satuan Pengukuran:	Nilai		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PANRB - Biro Hukum dan Kepegawaian		
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi RB oleh Kementerian PAN-RB		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

IKSP.12.3		
Perspektif* :		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas kelembagaan yang baik diperoleh dari implementasi SAKIP, implementasi Reformasi Birokrasi, serta pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standarkearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan	
	Formula	
	Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang).	
	Tujuan	
Mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI, serta untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik		
Satuan Pengukuran:	Indeks	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama		
Unit/Pihak Penyedia Data:	ANRI - Biro Umum		
Sumber Data:	Laporan hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.13.1		
Perspektif* :		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran dan fungsi APIP secara efektif.	
Indikator Kinerja Individu:	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	<p>Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan. Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu : peran dan layanan, pengelolaan sdm, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan korporasi, serta struktur tata kelola.</p>	
	Formula	
	<p>Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Basarnas oleh BPKP atau Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Basarnas oleh Inspektorat</p> <p>Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu : Level 1 = Initial, Level 2 = nfrastructure, Level 3 = Integrated, Level 4 = Managed, Level 5 = Optimizing. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP</p>	
	Tujuan	
	<p>a. Menentukan kriteria kebutuhan audit intern sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko operasi.</p> <p>b. Menilai kesesuaian kapabilitas audit intern yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan.</p> <p>c. Mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dengan kapabilitas yang ada serta mengupayakan pengembangan sampai level kapabilitas yang sesuai</p>	
Satuan Pengukuran:	Level 1-5	
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama		
Unit/Pihak Penyedia Data:	BPKP - Inspektorat		
Sumber Data:	Hasil pemetaan level kapabilitas dari BPKP		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Biro Hukum dan Kepegawaian**

INDIKATOR KINERJA 2.1			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pegawai		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap instansi Pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Merit.		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Sistem Merit		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan		
	Formula		
	berdasarkan penilaian dari KASN		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan		
	Evaluasi dilaksanakan untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan dan pelaporan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin		
Satuan Pengukuran:	Indeks		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kepegawaian		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian - Substansi Kepegawaian		
Sumber Data:	Matriks Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2.1				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pegawai			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap instansi Pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Merit.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kepuasan layanan kepegawaian terhadap pegawai dilingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	kuesioner tertutup terhadap pegawai dilingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Tujuan			
Evaluasi dilaksanakan untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan dan pelaporan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin				
Satuan Pengukuran:	Indeks 1-5			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kepegawaian			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian - Substansi Kepegawaian			
Sumber Data:	kuesioner tertutup terhadap pegawai dilingkungan Badan Nasional			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2.2	
Perspektif* :	(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)□
Rencana Kinerja :	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan produk hukum yang berkualitas mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari produk hukum yang dihasilkan kemudian disebarluaskan sehingga dapat dilaksanakan oleh pihak terkait
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Mengukur Jumlah Persentase Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur yang ditetapkan
	Formula
	$\text{NSPK yang ditetapkan} = \frac{N1+N2+N3+N4}{4}$
	$\text{Perban yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Perban}}{\text{Jml. Perban yang disahkan}}$
	$\text{Instrumen Hukum yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Instrumen Hukum}}{\text{Jml. Instrumen Hukum yang disahkan}}$
	$\text{Telaah Hukum yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Telaah Hukum}}{\text{Jml. Telaah Hukum yang disahkan}}$
	$\text{Evaluasi yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Evaluasi}}{\text{Jml. Evaluasi yang disahkan}}$
	Tujuan
	Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin
Satuan Pengukuran:	Persen (%)
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kepegawaian
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian - Substansi Hukum
Sumber Data:	Peraturan yang telah diundangkan

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2.2

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan produk hukum yang berkualitas mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari produk hukum yang dihasilkan kemudian disebarluaskan sehingga dapat dilaksanakan oleh pihak terkait			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kepuasan terhadap layanan informasi hukum			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kepuasan pelayanan informasi hukum			
	Formula			
	Skala 1-5			
	Tujuan			
	Monitoring dan pemantauan kepuasan terhadap layanan informasi hukum yang termuat didalam website JDIH Basarnas			
Satuan Pengukuran:	Skala			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kepegawaian			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian - Substansi Hukum			
Sumber Data:	website JDIH Basarnas			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.1				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Indeks kesesuaian organisasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kesesuaian organisasi yang tepat struktur dilingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	indeks kesesuaian organisasi ini untuk mengukur kesesuaian organisasi yang tepat struktur			
	Formula			
	Dengan menggunakan pendekatan dengan indeks dimensi struktur dengan skor : STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3			
	Tujuan			
mengukur secara kuantitatif indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur				
Satuan Pengukuran:	indeks 1 - 4			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kepegawaian			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian - Substansi Organisasi dan Tatalaksana			
Sumber Data:	PermenPANRB nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Laporan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.2

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien		
Deskripsi Rencana Kinerja:	penyusunan peta proses bisnis dijabarkan menjadi SOP untuk mempermudah Basarnas dalam melaksanakan tugas sehingga tidak terjadi pelaksanaan tugas yang tumpang tindih dan memiliki alur yang jelas serta dapat membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	persentase penyusunan SOP yang disahkan ini untuk mengetahui berapa persen SOP yang sudah disusun di lingkungan Basarnas.		
	Formula		
	Mengukur Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan		
	$\%SOP \text{ yang disahkan} = \frac{\text{Jml. realisasi SOP yang disahkan}}{\text{Jml. Perencanaan Target SOP}} \times 100\%$		
	Tujuan		
	mengukur berapa persen SOP yang sudah disusun oleh Basarnas		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kepegawaian		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian - Substansi Organisasi dan Tatalaksana		
Sumber Data:	Peraturan PermenPANRB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan administrasi pemerintahan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.3

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Indek kepuasan layanan fasilitasi RB ini digunakan untuk mengukur berapa skala pelayanan fasilitasi RB, ketepatan dalam memberikan penyampaian informasi pengumpulan data dukung untuk pelaksanaan RB di lingkungan Basarnas.	
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi RB ini untuk mengetahui ketepatan Biro Hukum dan Kepegawaian dalam memberikan layanan informasi terhadap pokja RB terkait dalam pengumpulan data dukung untuk pelaksanaan RB di lingkungan Basarnas	
	Formula	
	Hasil survei kepada Pokja Reformasi Birokrasi dengan Pendekatan Aspek Ketepatan Penyampaian Informasi dengan Skor : STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3 SS (Sangat Setuju) = 4	
	Tujuan	
	mengukur secara kuantitatif indeks kepuasan layanan fasilitasi RB dilingkungan Basarnas	
Satuan Pengukuran:	Skala	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kepegawaian	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian - Substansi Organisasi dan Tatalaksana	
Sumber Data:	Hasil survei layanan fasilitasi RB	

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

**Manual Indikator Kinerja
Biro Umum**

IKSK 8.1.1.a		
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi keamanan, kebersihan dan kesehatan bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.</i>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	untuk mengetahui pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi layanan pramubhakti, layanan keamanan di lingkungan kerja, layanan kebersihan ruangan dan halaman serta toilet pada Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jumlah yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah sampling}} \times 100\%$	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan	
	Mengukur persentase kepuasan pelayanan petugas keamanan, parkir, taman, kebersihan dan tenaga honorer	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum - Bagian Rumahtangga dan Protokol	

Sumber Data:	Hasil Survei Kepuasan Layanan Kesehatan dan Layanan Umum di lingkungan Kantor Pusat Basarnas			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 8.1.1.b	
Perspektif* :	Internal Process
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi penyelenggaraan kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi untuk mengetahui kinerja penatausahaan BMN yang meliputi pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara
	Formula
	$A \% = \frac{\text{Jumlah Analisa hasil RKBMN}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}} \times 100\%$
	$B \% = \frac{\text{Jumlah pelaporan BMN yang sudah tepat}}{\text{Jumlah Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$
	$C \% = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$
$D \% = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$	
$E \% = \frac{\text{Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh penghapusan BMN}} \times 100\%$	
	Tujuan mengukur pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara
Satuan Pengukuran:	Persen (%)
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome
	(X) Output dengan tingkat kendali sedang

Unit/Penanggu jawab IK:	Biro Umum		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum - Bagian Rumah Tangga dan Protoko		
Sumber Data:	SIMAK-BMN, KPKNL, BA Rekonsiliasi, BAST		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 8.1.1.c

Perspektif* :	<i>Internal Process</i>	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi pengelolaan urusan dalam, kerumahtanggaan, pemeliharaan, keprotokolan, dan urusan ketatausahaan Pimpinan, adapun salah satu kegiatannya yaitu mendukung operasional dan pemeliharaan peralatan kantor serta sarana gedung yang meliputi bangunan, halaman, instalasi dan jaringan serta kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.</i>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	mengetahui efektivitas kegiatan operasional dan pemeliharaan peralatan kantor serta sarana gedung yang meliputi bangunan, halaman, instalasi dan jaringan serta kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
	Formulasi	
	$\% = \frac{\text{Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana layanan operasional dan pemeliharaan kantor}} \times 100\%$	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan	
	mengukur kinerja layanan operasional dan pemeliharaan peralatan kantor serta sarana gedung yang meliputi bangunan, halaman, instalasi dan jaringan serta kendaraan dinas	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali tinggi
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum - Bagian Rumah Tangga dan Protokol cq. Sub Bagian Urusan dalam dan Pemeliharaan	

Sumber Data:	Laporan Pemeliharaan, Laporan Persediaan, Surat Usulan Pemeliharaan, Laporan Realisasi Anggaran			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 8.1.1.d

Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pusat Basarnas, menyebutkan bahwa Biro Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, dokumentasi, keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pengelolaan barang milik atau kekayaan negara			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui efektivitas kegiatan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah responden menyatakan "puas"}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengkukurlayanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali tinggi		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum_Bagian Rumah Tangga dan Protokol cq.Sub Bagian Protokol			
Sumber Data:	Laporan kegiatan, kuisisioner survei layanan keprotokoleran			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(x) Semesteran	(x) Tahunan

IKSK 8.1.1.e

Perspektif* : Internal Process

Rencana Kinerja : Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel

Deskripsi Rencana Kinerja: Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pusat Basarnas, menyebutkan bahwa Biro Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, dokumentasi, keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pengelolaan barang milik atau kekayaan negara

Indikator Kinerja Individu: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana

Deskripsi Indikator Kinerja Individu:

Definisi
Mengetahui pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok aparatur di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Formula

$$\% = \frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan pemenuhan sarana prasarana aparatur}}{\text{Jumlah rencanakegiatan pemenuhan sarana prasarana aparatur}} \times 100\%$$

Tujuan
Mengukur pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok aparatur di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Satuan Pengukuran: Persen (%)

Jenis Indikator Kinerja: () Outcome (X) Output dengan tingkat kendali sedang

Unit/Penanggung jawab IK: Biro Umum

Unit/Pihak Penyedia Data: Biro Umum_BagianRumah Tangga dan Protokol

Sumber Data:	RKA-K/L, KAK, SPSE, SIRUP, Laporan Pengadaan Barang/ Jasa, Realisasi Anggaran, dokumen pengadaan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(x) Semesteran	() Tahunan

IKSK 8.2.1.a

Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi pengelolaan urusan keuangan, adapun salah satu kegiatannya yaitu tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI serta tindaklanjut hasil pengawasan APIP.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase implementasi pengelolaan pelaksanaan anggaran yang berkualitas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui kinerja pengelolaan keuangan yang meliputi belanja, pendapatan, penatausahaan keuangan serta tindaklanjut hasil pengawasan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK-RI+APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$			
	Tujuan			
	Mengukur penyelesaian tindaklanjut rekomendasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI dan APIP			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum-Substansi Keuangan			
Sumber Data:	Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Keuangan Lembaga, OM-SPAN, IKPA, Laporan Realisasi Keuangan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan

IKSK 8.2.1.b

Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi pengelolaan urusan keuangan, adapun salah satu kegiatannya yaitu penyusunan rencana anggaran yang berkualitas.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase implementasi pengelolaan pelaksanaan anggaran yang berkualitas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan.			
	Formula			
	$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot } *$			
	Tujuan			
Mengukur implementasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum-Substansi Keuangan			
Sumber Data:	Usulan Revisi Anggaran, SAKTI, RKA-K/L, SMART-DJA, SIMONEV			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan

IKSK 8.2.1.c

Perspektif* :	Internal Process	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi pengelolaan urusan keuangan, selain pelaksanaan penatausahaan belanja di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Umum melaksanakan pengelolaan PNBPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara selain itu juga pelaksanaan penyusunan peraturan dan pedoman PNBPN	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penerimaan negara sesuai peraturan PNBPN	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengetahui pengelolaan PNBPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara dan penyusunan peraturan serta pedoman PNBPN di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Realisasi PNBPN}}{\text{Target PNBPN}} \times 100\%$	
	Tujuan	
		Mengukur ketepatan pengelolaan PNBPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali sedang
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum-Subtansi Keuangan	
Sumber Data:	SPM, SP2D, SSP, Laporan Realisasi Anggaran, laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJK)	

Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
---------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---

IKSK 9.1.2.b

Perspektif* :	<i>Internal Process</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas layanan publikasi informasi pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pusat Basarnas, menyebutkan bahwa Biro Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, dokumentasi, keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pengelolaan barang milik atau kekayaan negara</i>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kepuasan terhadap layanan dokumentasi dan publikasi informasi pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengetahui pelayanan publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jml.Responden puas}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$	
	Tujuan	
Mengukur kinerja publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum-Substansi Hubungan Masyarakat	

Sumber Data:	Data Polling, Data Survei, Buku Tamu Pameran			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK 9.1.2.a

Perspektif* :	<i>Meningkatkan Kualitas Kelembagaan</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pusat Basarnas, menyebutkan bahwa Biro Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, dokumentasi, keprotokolanan, pengelolaan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pengelolaan barang milik atau kekayaan negara</i>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengetahui pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi melalui pengelolaan website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jml. Realisasi kegiatan kehumasan}}{\text{Jumlah target kegiatan kehumasan}} \times 100\%$	
	Tujuan	
Mengukur kinerja publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum-Substansi Hubungan Masyarakat	

Sumber Data:	Laporan bulanan, laporan realisasi anggaran, laporan tahunan, Data Survei, Buku Tamu Pameran			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.12.3.1.a

Perspektif* :	Internal Process	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pusat Basarnas, menyebutkan bahwa Biro Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, dokumentasi, keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pengelolaan barang milik atau kekayaan negara</i>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengetahui efektifitas unit kerja baik unit kerja di Kantor Pusat maupun UPT dalam melaksanakan pengelolaan arsip yang sudah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kearsipan serta kaidah-kaidah kearsipan	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jumlah unit kerja berpredikat "Baik"}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$	
	Tujuan	
Mengukur efektifitas unit kerja baik unit kerja di Kantor Pusat maupun UPT dalam melaksanakan pengelolaan arsip yang sudah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kearsipan serta kaidah-kaidah kearsipan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali sedang
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum-Substansi Administrasi	

Sumber Data:	Form Uji Petik Pengelolaan Arsip, Laporan Audit Kearsipan Internal			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.8.3.1.a

Perspektif* :	<i>Internal Process</i>	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/ jasa yang profesional	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p><i>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pusat Basarnas, menyebutkan bahwa Biro Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, dokumentasi, keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat, kerumahaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pengelolaan barang milik atau kekayaan negara. selain itu tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, maka menyebutkan bahwa UKPBJ harus menjadi pusat keunggulan dalam pengadaan barang/ jasa</i></p>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	mengetahui penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang meliputi pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender dan swakelola baik proses pengadaan secara konvensional maupun pengadaan secara elektronik	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jumlah penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa}}{\text{Jumlah rencana pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$	
	Tujuan	
Mengukur penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang meliputi pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender dan swakelola baik proses pengadaan secara konvensional maupun pengadaan secara elektronik		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali sedang

Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum_Bagian UKPBJ			
Sumber Data:	DIPA, RKA-K/L, RUP, SIRUP, LPSE, Dokumen Pengadaan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5.2

Perspektif* :	<i>Internal Process</i>	
Rencana Kinerja :	Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/ jasa yang profesional	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p><i>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pusat Basarnas, menyebutkan bahwa Biro Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, dokumentasi, keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pengelolaan barang milik atau kekayaan negara. selain itu tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, maka menyebutkan bahwa UKPBJ harus menjadi pusat keunggulan dalam pengadaan barang/ jasa</i></p>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kebijakan pengadaan barang/ jasa yang ditetapkan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	mengetahui penyelesaian kebijakan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah disusun	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jumlah draft kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan}}{\text{Jumlah draft kebijakan pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$	
	Tujuan	
mengukur penyelesaian kebijakan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah disusun		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali sedang
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Umum	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum_Bagian UKPBJ			
Sumber Data:	DIPA, RKA-K/L, RUP, SIRUP, LPSE, Dokumen Pengadaan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Biro Perencanaan**

IKSK.11.1.1.a				
Perspektif* :	<i>stakeholder perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri, penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kerja sama di bidang SAR			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indikator ini mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama pencarian dan pertolongan dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan.			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{(Jumlah Dokumen Kerjasama SAR)}}{\text{(Jumlah Dokumen Kerjasama SAR yang direncanakan)}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Indikator ini bertujuan agar kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan semakin meningkat				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.11.1.1.b				
Perspektif* :	<i>stakeholder perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri, penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri,			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indikator ini mengukur jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada melalui jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{(Jumlah Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti)}}{\text{(Jumlah Perjanjian Kerjasama SAR yang ada)}} \times 100\%$			
	Tujuan untuk mengetahui tindaklanjut dari kerja sama yang sudah ada			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.12.1.1.a

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Pengendalian program dan anggaran dilihat dari hasil pemantauan monitoring, pemantauan aplikasi, dan laporan berkala.			
	Formula			
	$\% = ((\text{target kegiatan/capaian kegiatan}) + (\text{target anggaran/capaian anggaran}))/2$			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Evaluasi dilaksanakan untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan dan pelaporan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Laporan monitoring, aplikasi pemantauan kegiatan dan anggaran			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.12.1.1.b				
Perspektif* :	<i>learn dan growth</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.			
	Formula			
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)			
	Nilai hasil evaluasi AKIP: Predikat AA (Nilai > 90 – 100) - Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai > 80 – 90) - Memuaskan Predikat BB (Nilai > 70 – 80) - Sangat Baik Predikat B (Nilai > 60 - 70) - Baik Predikat CC (Nilai > 50 – 60) - Cukup (Memadai) Predikat C (Nilai > 30 – 50) - Kurang Predikat D (Nilai > 0 – 30) - Sangat Kurang			
	Tujuan memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Kementerian PAN-RB			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.12.1.1.c

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Nilai penguatan akuntabilitas diperoleh dari hasil evaluasi pada LKE RB yang terdiri dari aspek: a. pemenuhan yaitu : keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja b. reform, yaitu: Efektifitas dan Efisiensi anggaran, pemanfaatan aplikasi akuntabilitas, pemberian reward dan punishment, kerangka logis kinerja.			
	Formula			
	Berdasarkan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB			
	Tujuan			
Tujuan evaluasi ini adalah untuk menciptakan lembaga yang akuntabel dan berkinerja tinggi				
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi RB Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.12.1.1.d		
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.	
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penting untuk peningkatan kualitas implementasi Penganggaran berbasis kinerja (PBK) melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP). Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan dengan mengisi capaian kinerja oleh satker melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sebagai alat monitoring capaian kinerja yaitu: a. kualitas data baik, tidak ada data anomali atas pengisian capaian kinerja b. pengisian capaian kinerja sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali dalam setahun. Badan Nasional Pencarian dan Perolongan termasuk dalam K/L berkategori pagu kecil (dibawah 2,5 triliun)	
	Formula	
	Diketahui dari aplikasi SMART : smart.kemenkeu.go.id	
	Tujuan	
Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan (Proving) dan untuk memberi feedback bagi proses penganggaran berikutnya (improving)		
Satuan Pengukuran:	Nilai	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Unit Eselon II Kantor Pusat			
Sumber Data:	Realisasi anggaran, Progres pekerjaan, Laporan Triwulan			
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.12.1.2.a.

Perspektif* :	<i>Internal Process</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.</p>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	<p>Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Beberapa penyebab anggaran masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap, proporsi anggaran yang kurang tepat, penelaahan dilakukan secara on-line dan waktu yang singkat, mengakibatkan penjelasan pada waktu pendalaman terhadap kegiatan-kegiatan yang disampaikan belum maksimal</p>	
	Formula	
	$\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang tidak diblokir}}{\text{Jumlah pagu anggaran pada DIPA}} \right) \times 100\%$	
	Tujuan	
<p>Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menerapkan peraturan terkait pengusulan anggaran unit kerja dan UPT antara lain berupa kelengkapan data dukung dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengusulan anggaran</p>		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja dan UPT		
Sumber Data:	Dokumen usulan anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.12.1.2.b

Perspektif* :	<i>Internal Process</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.</p>	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menyerahkan dokumen usulan rencana dan program tepat waktu	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jumlah Unit Kerja dan UPT yang menyampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja dan UPT}} \times 100\%$	
	<p>Tujuan</p> <p>Untuk mengetahui jumlah unit kerja dan UPT yang menyampaikan data usulan rencana dan program tepat waktu</p>	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja dan seluruh UPT	
Sumber Data:	Dokumen usulan rencana dan program, Rekapitulasi pengumpulan dokumen	

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

IKSK.12.1.2.c

Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.</p>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Untuk mengetahui sejauh mana Biro Perencanaan melaksanakan kesepakatan yang ditetapkan dalam dokumen pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)			
	Formula			
	$\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran PN yang disetujui saat trilateral meeting}}{\text{Jumlah usulan pagu indikatif}} \times 100\% \right)$			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Untuk mengetahui kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam Dokumen pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penangjawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Biro Umum			
Sumber Data:	Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen kesepakatan pertemuan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Kepala Pusat Data dan Informasi**

IKSK.9.1.1.a.		
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □	
Rencana Kinerja :	Tersedianya data dan informasi yang akurat	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sehingga diharapkan Basarnas memiliki data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L untuk mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan untuk penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis.	
	Formula	
	$A \% = \frac{\text{Jumlah Data yang terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan}}{\text{Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data}} * 100$ $B \% = \frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang teralisasi}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$	
Tujuan	Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L.	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali sedang
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	

Sumber Data:	Data operasi pencarian dan pertolongan, data latihan pencarian dan pertolongan, data sarana SAR, data alat komunikasi, data pendidikan dan pelatihan tenaga, data pelatihan potensi, data koordinasi, data sertifikasi, data masyarakat, data kepegawaian dan produk hukum, data anggaran, data humas, data ratsip, data BMN, MOU (dalam dan luar negeri).		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran
<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan			

IKSK.9.1.1.b.

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Tersedianya data dan informasi yang akurat			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui survei dengan hasil nilai indeks.			
	Formula			
	$\% = (\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi} / \text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan}) * 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan, registrasi radio beacon, dan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penangung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Responden			
Sumber Data:	Data Survei Kepuasan Masyarakat			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(x) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK 9.1.1.c		
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □	
Rencana Kinerja :	Tersedianya data dan informasi yang akurat	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berpedoman pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
Indikator Kinerja Individu:	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi dilakukan untuk mengetahui ketaatan dan kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.	
	Formula	
	Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, dengan kategori nilai Skor pemingkatan keterbukaan informasi publik sebagai berikut: Skor 97-100 = INFORMATIF Skor 80-96 = Menuju INFORMATIF Skor 60-79 = Cukup INFORMATIF Skor 40-59 = Kurang INFORMATIF Skor < 39 = Tidak INFORMATIF	
	Tujuan	
	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.	
Satuan Pengukuran:	Skor Keterbukaan Informasi Publik	
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	

Sumber Data:	Permohonan informasi, Dokumen pemenuhan pada penilaian skor KIP (43 dokumen).			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.9.2.1.a.

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.			
	Formula			
	Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8			
	Tujuan			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.				
Satuan Pengukuran:	Nilai Indeks SPBE			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Dokumen pemenuhan pada penilaian Indeks SPBE (rencana aksi, kebijakan, dll).			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK.9.2.1.b.

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengetahui kesiapan aplikasi dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional.			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik			
	Formula			
	$A \% = \frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi}}{365 \text{ hari} * 24 \text{ jam}} * 100$ $B \% = \frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur}}{365 \text{ hari} * 24 \text{ jam}} * 100$ $C \% = \frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime internet}}{365 \text{ hari} * 24 \text{ jam}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%)}{3} * 100$			
	Tujuan			
Meningkatkan pelayanan kepada pengguna aplikasi dan infrastruktur dalam				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK.9.2.1.c.

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui jumlah dukungan bidang teknologi informasi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun}}{\text{total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun}} \times 100\%$			
	Tujuan Mengukur tingkat dukungan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK.9.3.1.a.

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun			
	Formula			
	$A \% = \frac{\text{(jumlah realisasi penyerapan anggaran)}}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$ $B \% = \frac{\text{(jumlah penggunaan arsip)}}{\text{jumlah berkas}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$			
	Tujuan			
Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Pusat Data dan Informasi				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/ Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi			
Unit/ Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK.9.3.1.b.

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengukur persentase pemenuhan kompetensi SDM yang tersertifikasi			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah SDM yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi tahun berjalan}} * 100$			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Inspektorat**

IKSK.13.1.1.a.		
Perspektif* :	<i>Customer Perspektif</i> □	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.	
Indikator Kinerja Individu:	Level kapabilitas APIP	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem	
	Formula	
	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan kategori penilaian “Level 1”, “Level 2” dan “Level 3”.	
	Tujuan	
	Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan untuk : - mengetahui efektivitas kegiatan self assessment (penilaian mandiri) yang tercermin dari level kapabilitas dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia - memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungan APIP - mengembangkan road map untuk perbaikan yang terarah bagi	
Satuan Pengukuran:	Level	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat	
Sumber Data:	Hasil validasi oleh Tim Penjaminan Kualitas BPKP dengan indikator Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM).	

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

IKSK.13.1.1.b.		
Perspektif* :	<i>Customer Perspektif</i>	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan dengan Pengembangan Kompetensi dan pengawasan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta Pengawasan Lainnya.	
Indikator Kinerja Individu:	Level maturitas implementasi SPIP	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.	
	Formula	
	Berdasarkan hasil nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP bersama APIP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP	
Tujuan	SPIP dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Satuan Pengukuran:	Level	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat	

Sumber Data:	Hasil Evaluasi dari BPKP bersama APIP		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.13.1.1.c.				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase tingkat kepatuhan satker menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti oleh Satker berstatus proses dan/atau tuntas.			
	Formula			
	$\frac{\sum \text{satker yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal}}{\sum \text{rekomendasi}} \times 100\%$			
	Tujuan Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Inspektorat, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh dengan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT			
Sumber Data:	Laporan tindak lanjut hasil pengawasan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.13.1.1.d.	
Perspektif* :	<i>Learning and Growth</i>
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.
Indikator Kinerja Individu:	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau <i>outcome</i> <i>contoh : dijelaskan per spesialisasi</i>
	Formula Penilaian atas AKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); Pencapaian Kinerja (20%) dan Berdasarkan Peraturan MENPAN-RB Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem AKIP, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA"
	Tujuan Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk : 1. Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result oriented government</i>); 2. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 3. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat

Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Unit Eselon I dan II Kantor Pusat		
Sumber Data:	Laporan Evaluasi SAKIP internal		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.13.1.1.e.	
Perspektif* :	<i>Learning and Growth</i>
Rencana Kinerja :	Meningkatnya dukungan pengawasan intern
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, rapat, koordinasi dan pendampingan.
Indikator Kinerja Individu:	Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Nilai yang menggambarkan kemampuan aparatur untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
	Formula Pengukuran capaian nilai evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat dilakukan berdasarkan hasil penilaian Kemenpan dan RB atas implementasi RB pada komponen penguatan pengawasan
	Tujuan Penguatan pengawasan bertujuan sebagai bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penguatan pengawasan di lingkungan Inspektorat
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat
Sumber Data:	Dokumen Evaluasi PMPRB pada komponen penguatan pengawasan
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.13.1.1.f.				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya dukungan pengawasan intern			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan, koordinasi dan pendampingan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase integritas penyelenggara negara terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	LHKPN memiliki peran dari sisi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi (TPK). LHKPN berperan sebagai instrumen sosial yang dibentuk oleh hukum untuk memastikan integritas para calon PN/pengisi jabatan publik; menimbulkan rasa takut di kalangan PN untuk berbuat korupsi; menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab di kalangan PN; mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik PN dengan kepentingan pribadinya; meningkatkan kontrol masyarakat terhadap PN; dan menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.			
	Formula			
	$\frac{\sum \text{Penyelenggara Negara yang telah melaporkan harta kekayaan}}{\sum \text{Penyelenggara Negara}} \times 100\%$			
	Tujuan			
	Untuk penguatan dan pengujian integritas mencegah tindak korupsi, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, mendeteksi konflik kepentingan antara tugas dan kepentingan pribadi dan sebagai penyedia sarana dan perangkat kontrol.			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja dan seluruh UPT			
Sumber Data:	Aplikasi e-LHKPN			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.13.1.2.a.				
Perspektif* :	<i>Learning and Growth</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya dukungan pengawasan intern			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi APIP melalui diklat, pelatihan kantor sendiri, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, lokakarya, webinar.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase APIP yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Peningkatan Kompetensi APIP yang diukur adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan APIP sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.			
	Formula			
	$\frac{\sum \text{APIP yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi}}{\sum \text{APIP}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di bidang pengawasan dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas APIP				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat			
Sumber Data:	Laporan Triwulan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(V) Semesteran	() Tahunan

IKSK.13.1.2.b.				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya dukungan pengawasan intern			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Rencana kinerja yang dilakukan melalui Pelaksanaan Anggaran yang akuntabel sesuai Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria yang berlaku.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pengelolaan anggaran Inspektorat yang optimal			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase pengelolaan anggaran yang optimal digunakan untuk mengukur pelaksanaan anggaran dari sisi efisiensi, penyerapan atas pagu dan memenuhi keluaran riil / ketercapaian volume indikator kinerja output yang telah direncanakan dalam DIPA. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.			
	Formula			
	\sum Persentase Penyerapan Anggaran + \sum Persentase Pencapaian Output			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Sebagai alat ukur, evaluasi, kontrol terhadap pelaksanaan anggaran serta agar tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan tercapai.			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat			
Sumber Data:	Laporan Triwulan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(V) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.13.1.2.c.				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya dukungan pengawasan intern			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Rencana kinerja yang dilakukan melalui Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan internal sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai hasil pengawasan kearsipan Internal unit kerja Inspektorat berkategori "baik"			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan nilai Pengawasan Kearsipan internal yang dinilai oleh Biro Umum			
	Formula			
	Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan Internal : AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang)			
	Tujuan			
Mewujudkan tertib arsip dinamis dan terselamatkannya arsip statis pada pencipta arsip tingkat pusat.				
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum			
Sumber Data:	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan internal			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Kantor Pencarian dan Pertolongan**

IKSK.14.1.1.a.	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)
	Formula
	$Response\ time = \frac{\sum T1 - T0}{Jumlah\ Respon}$
	Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita
Tujuan	meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan
Satuan Pengukuran:	menit
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali sedang
Unit/Penanggunjawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga
Sumber Data:	Formulir Precom - Excom, Berita SAR
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

IKSK.14.1.1.b.				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.			
	Formula			
	$\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Berita SAR, Aplikasi Simasda			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.14.1.1.c.				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.			
	Formula			
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan			
	Tujuan			
Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR.				
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga (Pusat Data dan Informasi)			
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKM dalam format excel (laporan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SAR)			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.14.1.2.a	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR. Siaga SAR terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.
	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Peraturan Badan No. 18 thn 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.
	Formula
	Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus. -Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100 -Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 -Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100
Tujuan	
	untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penangggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga

Sumber Data:	Laporan siaga rutin/khusus, cek list pengecekan peralatan SAR			
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.3.a

Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pembinaan Potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017)			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan			
	Formula			
	$\% = (\text{realisasi potensi yang dibina} / \text{target potensi yang dibina}) \times 100\%$			
	Tujuan menilai kinerja pembinaan potensi SDM			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggun jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya			
Sumber Data:	Laporan pembinaan potensi SAR			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(x) Semesteran	() Tahunan

IKSK. 14.1.4.a	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Perban No. 9 Tahun 2020)
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan
	Formula
	$\% = (\text{Jumlah latihan yang bernilai baik} / \text{jumlah latihan yang dilaksanakan}) \times 100\%$
	Tujuan Evaluasi latihan dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana prasarana latihan.
Satuan Pengukuran:	Persen (%)
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome <input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumbe Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi latihan
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.5.a

Perspektif* :	internal process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>a. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan maka harus melalui uji kompetensi sehingga wajib dilakukan pembinaan.</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Pencarian dan Pertolongan bahwa setiap pembinaan dan pengelolaan tenaga harus berpedoman pada kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi pencarian dan pertolongan</p>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK.			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan}}{\text{Jumlah tenaga rescuer dan ABK Kantor SAR}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya			
Sumber Data:	Laporan pembinaan tenaga rescuer dan ABK			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.6.a

Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN}}{\text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>

IKSK. 14.1.7.a

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan			
	Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 0 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK. 14.1.7.b	
Perspektif* :	(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)□
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran
Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaian dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survei, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Umum.
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
	Formula
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal
	Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang
Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian: A: Tingkat Kepuasan ≥ 80-100 B: Tingkat Kepuasan ≥ 60 < 80 C: Tingkat Kepuasan ≥ 40 < 60 D: Tingkat Kepuasan < 40	
Tujuan	
Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT	
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100
Jenis Indikator	(X) Outcome () Output dengan tingkat بندی rendah

Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendala rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum			
Sumber Data:	Rekap hasil survei dan nilai audit kearsipan dari Biro Umum			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.7.c	
Perspektif* :	(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)□
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP (APIP)
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT
	Formula Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)
	Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang
	Tujuan memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome () Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	APIP			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan

INDIKATOR KINERJA 1.1		
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas ASN Badan Nasional pencarian dan pertolongan adalah meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kelulusan peserta yang mengikuti diklat serta kepuasan peserta diklat atas pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kelulusan peserta Diklat Aparatur dan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan (Utama)	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur Jumlah Peserta Diklat dalam setahun dibagi jumlah peserta diklat yang lulus	
	Formula	
	$\% = \frac{\text{Jumlah peserta diklat setahun}}{\text{jumlah peserta diklat yang lulus dalam setahun}} \times 100\%$	
	Tujuan	
	meningkatkan kinerja Pegawai ASN badan nasional pencarian dan pertolongan	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali sedang
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi Penyelenggaraan Diklat	
Sumber Data:	Laporan Kelulusan Peserta Diklat	

Periode Pelaporan:

Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

IKSK. 15.1.1.b				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas ASN Badan Nasional pencarian dan pertolongan adalah meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kelulusan peserta yang mengikuti diklat serta kepuasan peserta diklat atas pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan peserta Diklat atas pelayanan Balai Diklat (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Pelayanan Diklat pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek pelayanan diklat, materi, kesesuaian kurikulum, kualitas sarpras serta kompetensi pengajar.			
	Formula			
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan peserta diklat selama berada di balai diklat			
	Tujuan			
	Diukur dari hasil survei kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan balai diklat.			
Satuan Pengukuran:	Indeks Skala 1-4			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi Penyelenggaraan Diklat			
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKPD dalam format excel (laporan indeks kepuasan peserta diklat atas pelayanan lembaga diklat)			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 15.1.2.a				
Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN}}{\text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}} \times 100\%$			
	Tujuan			
	Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/ Seksi Penyiapan Sarpras			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 15.1.2.b

Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan diklat yang diukur adalah pelaksanaan diklat berkala			
Indikator Kinerja Individu:	Prosentase Kesiapan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR.			
	Formula			
	$\% \text{ Kesiapan sarana prasarana dan alat pengajaran} = (\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100$			
	Tujuan untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kasi Penyiapan Sarana Prasarana			
Sumber Data:	cek list pengecekan dan perawatan sarana dan prasarana dan peralatan SAR			
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.15.1.3.a.

Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan			
	Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 0 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.15.1.3.b.		
Perspektif* :		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaia dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survey, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Umum.	
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.	
	Formula	
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal	
	Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang	
Tujuan		
	Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei dalam format excel
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.15.1.3.c.		
Perspektif* :		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP (APIP)	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pengukuran pelaporan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	
	Formulasi	
	Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor >60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang	
	Tujuan memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	
Satuan Pengukuran:	Nilai	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum	

Sumber Data:

APIP

Periode Pelaporan:

Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

ttd.

HENRI ALFIANDI